LPPD 2022

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**

Daftar Tabel ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Penjelasan Umum 1

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 13

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan 112

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **117**

2.1 Capaian Kinerja Makro 117

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 118

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 120

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 268

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Penunjang 307

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan 317

BAB III CAPAIN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN **385**

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 386

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan 386

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 387

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten 387

3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten 405

3.4 Permasalahan 408

3.5 Saran dan Tindak Lanjut 408

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL **409**

4.1 Urusan Pendidikan 409

4.1.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah 409

4.1.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022 410

4.1.3 Alokasi Anggaran 412

4.1.4 Dukungan Personil 417

4.1.5 Permasalahan dan Solusi 418

4.2 Urusan Kesehatan 420

4.2.1 Target Penca[aian SPM Oleh Daerah 420

4.2.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022 422
4.2.3 Alokasi Anggaran 427
4.2.4 Dukungan Personel 437
4.2.5 Permasalahan dan Solusi 437
4.3 Urusan Umum 442
4.3.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah 442
4.3.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022 444
4.3.3 Alokasi Anggaran 446
4.3.4 Dukungan Personil 449
4.3.5 Permasalahan dan Solusi 449
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 450
4.4.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah 450
4.4.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022 452
4.4.3 Alokasi Anggaran 453
4.4.4 Dukungan Personel 458
4.4.5 Permasalahan dan Solusi 458
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 459
4.5.1 Target Penca[aian SPM Oleh Daerah 459
4.5.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022 462
4.5.3 Alokasi Anggaran 464
4.5.4 Dukungan Personil 470
4.5.5 Permasalahan dan Solusi 470
4.6 Urusan Sosial 471
4.6.1 Target Penca[aian SPM Oleh Daerah 471
4.6.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022 473
4.6.3 Alokasi Anggaran 476
4.6.4 Dukungan Personel 481
4.6.5 Permasalahan dan Solusi 481
BAB V PENUTUP 482
4.1 Penghargaan Prestasi 482
4.2 Penutup 484

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Tahun 2022 3

Tabel 1.2 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 4

Tabel 1.3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022 5

Tabel 1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan 5

Tabel 1.5 Daftar Perangkat Daerah dan Pegawai per 31 Desember 2022 9

Tabel 1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022 12

Tabel 1.7 Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan RKPD Tahun 2022 28

Table 1.8 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 113

Tabel 1.9 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 114

Tabel 1.10 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 114

Tabel 1.11 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021 115

Tabel 1.12 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Ketrentaman dan Ketertiban Tahun 2021 115

Tabel 1.13 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Sosial Tahun 2022 116

Tabel 2.1 Indikator kinerja makro Kabupaten Pacitan tahun 2021 – 2022 .. 117

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 121

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil 275

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci Penunjang 316

Tabel 2.5 Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 326

Tabel 2.6 Target Perjanjian Kinerja 326

Tabel 2.7 Anggaran Tahun 2022 328

Tabel 2.8 Target Perjanjian Kinerja 335
Tabel 2.9 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 339
Tabel 2.10 Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 343
Tabel 2.11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2022 346
Tabel 2.12 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan 348
Tabel 2.13 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 350
Table 2.14 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat 353
Table 2.15 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan..... 354
Tabel 2.16 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat 357
Tabel 2.17 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat 362
Tabel 2.18 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat 364
Tabel 2.19 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan 367
Tabel 2.20 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pariwisata 372
Table 2.21 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi 375
Table 2.22 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif 376
Table 2.23 Analisis Efisiensi Sasaran Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah..... 378
Table 2.24 Analisis Efisiensi Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan..... 379
Table 2.25 Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa 382
Tabel 3.1 Target Kinerja Tugas Pembantuan yang diberikan Oleh Pemerintah Pusat..... 387
Tabel 3.2 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah..... 389
Table 3.3 Target Kinerja Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur 393

Table 3.4 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah 396
Table 4.1 Target Pencapaian Bidang Pendidikan 409
Table 4.2 Realisasi SPM Bidang Pendidikan 410
Tabel 4.3 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan 412
Tabel 4.4 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin 417
Tabel 4.5 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin 417
Tabel 4.6 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon 417
Tabel 4.7 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan 418
Tabel 4.8 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan 418
Tabel 4.9 Target Pencapaian Bidang Kesehatan 420
Tabel 4.10 Realisasi Pencapaian Bidang Kesehatan 422
Tabel 4.11 Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan 427
Tabel 4.12 Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan 437
Tabel 4.13 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan 438
Tabel 4.14 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 442
Tabel 4.15 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum 444
Tabel 4.16 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 447
Tabel 4.17 Dukungan Personel SPM Bidang Pekerjaan Umum 449
Tabel 4.18 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum 449
Tabel 4.19 Target Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat 451
Tabel 4.20 Realisasi Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat 452
Tabel 4.21 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat 454
Tabel 4.22 Dukungan Personel SPM Bidang Perumahan Rakyat 458
Tabel 4.23 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat 458
Tabel 4.24 Target Pencapaian Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 459
Tabel 4.25 Realisasi Pencapaian Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 462
Tabel 4.26 Dukungan Personel SPM Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 470
Tabel 4.27 Target Pencapaian Bidang Sosial 471
Tabel 4.28 Realisasi Pencapaian Bidang Sosial 473
Tabel 4.29 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial 477
Tabel 4.30 Dukungan Personel SPM Bidang Sosial 481
Tabel 5.1 Capaian Penghargaan Kabupaten Pacitan Tahun 2022 482

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69, Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

1.1.1. Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 1995

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara $7{,}55^{o}$ - $8{,}17^{o}$ Lintang Selatan dan $110{,}55^{o}$ - $111{,}25^{o}$ Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 km^2, dimana secara administratif terbagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 166 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 km^2. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 71,86 km^2.

Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :

a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km^2 atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km^2 atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km^2 atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km^2 atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km^2 atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 24,26mm^3, sedangkan curah hujan terkecil pada bulan September sebesar 2,19mm^3.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha
- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	DONOROJO	19.041	19.376	38.417
2	PRINGKUKU	16.536	16.704	33.240
3	PUNUNG	18.777	19.089	37.866
4	PACITAN	38.965	39.582	78.547
5	KEBONAGUNG	24.127	23.140	47.267
6	ARJOSARI	21.400	20.954	42.354
7	NAWANGAN	26.528	26.235	52.763
8	BANDAR	23.025	22.666	45.691
9	TEGALOMBO	26.558	26.348	52.906
10	TULAKAN	43.883	43.057	86.940
11	NGADIROJO	24.134	24.278	48.412
12	SUDIMORO	17.518	17.261	34.779
JUMLAH		**300.492**	**298.690**	**599.182**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2022 mencapai 599.182 jiwa terdiri atas 300.492 jiwa penduduk laki-laki dan 298.690 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa proporsi penduduk di wilayah Kecamatan Tulakan terbanyak dengan jumlah sebesar 86.940 jiwa atau mencapai 14,5 % dari total penduduk sedangkan Kecamatan Pacitan berada pada posisi kedua walaupun merupakan kecamatan kota di Kabupaten Pacitan. Penduduk Kabupaten Pacitan yang sebesar 599.182 jiwa tersebut terbagi menjadi penduduk usia kerja (15 Tahun ke Atas) dan bukan usia kerja.

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022

No	Lapangan Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pertanian/ Perkebunan / Peternakan	189.989	41,40
2	Perikanan / Kelautan	1.371	0,30
3	Pertambangan/ Industri	154	0,03
4	Perdagangan	3.482	0,76
5	Angkutan/ Transportasi	877	0,19
6	Bank/ Persewaan/ Perusahaan	346	0,08
7	Jasa – jasa	38.024	8,29
8	Pemerintahan	10.953	2,39
9	Kesehatan	380	0,08
10	Pendidikan	2.400	0,52
11	Keagamaan	27	0,01
12	Lain – lain	75	0,02
	- Pensiunan	4.187	0,91
	- Belum/tdk bekerja	85.098	18,55
	- Mengurus rumah tangga	34.425	7,50
	- Pelajar mahasiswa	87.071	18,98
JUMLAH		**458.859**	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 34,22 %. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas.

Tingkat produktifitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	TIDAK/BLM SEKOLAH	86.199	14,386
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	45.928	7,665
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	215.436	35,955
4.	SLTP/SEDERAJAT	123.358	20,588
5.	SLTA/SEDERAJAT	100.106	16,707
6.	DIPLOMA I/II	2.379	0,397
7.	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	3.002	0,501
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	21.826	3,643
9.	STRATA-II	920	0,154
10.	STRATA-III	28	0,005
Jumlah		599.182	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Wilayah Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terbagi menjadi 167 Desa dan 5 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
1	Kecamatan Donorojo	1	Sawahan
		2	Kalak
		3	Sendang
		4	Klepu
		5	Gedompol
		6	Cemeng
		7	Gendaran
		8	Sukodono
		9	Sekar
		10	Donorojo
		11	Belah
		12	Widoro
2	Kecamatan Punung	13	Bomo
		14	Sooko
		15	Punung

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		16	Mendolo Kidul
		17	Piton
		18	Kendal
		19	Wareng
		20	Mantren
		21	Ploso
		22	Mendolo Lor
		23	Kebonsari
		24	Gondosari
		25	Tinatar
3	Kecamatan Pringkuku	26	Dersono
		27	Sugihwaras
		28	Watukarung
		29	Jlubang
		30	Candi
		31	Poko
		32	Dadapan
		33	Pringkuku
		34	Sobo
		35	Ngadirejan
		36	Glinggangan
		37	Pelem
		38	Tamanasri
4	Kecamatan Pacitan	39	Pacitan
		40	Pucangsewu
		41	Sidoharjo
		42	Ploso
		43	Baleharjo
		44	Kembang
		45	Sukoharjo
		46	Kayen
		47	Sirnoboyo
		48	Arjowinangun
		49	Bangunsari
		50	Sedeng
		51	Sumberharjo
		52	Tanjungsari
		53	Menadi
		54	Mentoro
		55	Purworejo
		56	Nanggungan
		57	Widoro
		58	Semanten
		59	Sambong

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		60	Banjarsari
		61	Bolosingo
		62	Ponggok
		63	Tambakrejo
5	Kecamatan Arjosari	64	Sedayu
		65	Tremas
		66	Arjosari
		67	Gunungsari
		68	Pagutan
		69	Gembong
		70	Borang
		71	Gegeran
		72	Kedungbendo
		73	Mangunharjo
		74	Temon
		75	Karanggede
		76	Karangrejo
		77	Jetis Kidul
		78	Gayuhan
		79	Jatimalang
		80	Mlati
6	Kecamatan Kebonagung	81	Plumbungan
		82	Karangnongko
		83	Kalipelus
		84	Karanganyar
		85	Katipugal
		86	Klesem
		87	Sidomulyo
		88	Worawari
		89	Mantren
		90	Gawang
		91	Kebonagung
		92	Purwoasri
		93	Banjarjo
		94	Sanggrahan
		95	Punjung
		96	Gembuk
		97	Ketro
		98	Ketepung
		99	Wonogondo
7	Kecamatan Nawangan	100	Gondang
		101	Mujing
		102	Nawangan
		103	Sempu

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		104	Jetis Lor
		105	Tokawi
		106	Penggung
		107	Pakis Baru
		108	Ngromo
8	Kecamatan Bandar	109	Petrungsinarang
		110	Ngunut
		111	Bandar
		112	Kledung
		113	Tumpuk
		114	Watupatok
		115	Bangunsari
		116	Jeruk
9	Kecamatan Tegalombo	117	Kebondalem
		118	Gedangan
		119	Ngreco
		120	Kasihan
		121	Pucangombo
		122	Gemaharjo
		123	Ploso
		124	Tegalombo
		125	Kemuning
		126	Tahunan
		127	Tahunan Baru
10	Kecamatan Tulakan	128	Jetak
		129	Nglaran
		130	Wonoanti
		131	Padi
		132	Kluwih
		133	Bungur
		134	Tulakan
		135	Jatigunung
		136	Gasang
		137	Kalikuning
		138	Ngile
		139	Bubakan
		140	Losari
		141	Ngumbul
		142	Wonosidi
		143	Ketro
		144	Ketroharjo
11	Kecamatan Ngadirojo	145	Sidomulyo
		146	Hadiwarno
		147	Hadiluwih

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		148	Tanjungpuro
		149	Pagerejo
		150	Wiyoro
		151	Ngadirojo
		152	Cokrokembang
		153	Bodag
		154	Tanjung lor
		155	Nogosari
		156	Cangkring
		157	Bogoharjo
		158	Wonodadi Wetan
		159	Wonodadi Kulon
		160	Wonokarto
		161	Wonosobo
		162	Wonoasri
12	Kecamatan Sudimoro	163	Pager Kidul
		164	Pager Lor
		165	Sukorejo
		166	Sudimoro
		167	Ketanggung
		168	Klepu
		169	Sumber Rejo
		170	Gunung Rejo
		171	Karang Mulyo
		172	Sembowo

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Kinerja Pemerintah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia Pegawainya sehingga manajemen kepegawaian sangat penting dan serius ditangani supaya menciptakan pegawai yang berkualitas dan profesional. Sedangkan sesuai dengan data kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.5

Daftar Perangkat Daerah dan Pegawai
per 31 Desember 2022

No	Instansi	JML
1	Sekretariat Daerah	105

No	Instansi	JML
2	Sekretariat DPRD	35
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34
4	Inspektorat Daerah	40
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	30
8	BPBD	11
9	Dinas Pendidikan	4.728
	Dinas Pendidikan	114
	UPT TKSD + Guru DPK	359
	Guru SMP + Staf TU	1.102
	Guru SD + Penjaga	3.153
10	Dinas Kesehatan	932
	Dinas Kesehatan	45
	UPT Puskesmas	876
	UPT Dinas Gudang Farmasi Kesehatan	5
	UPT Dinas Laboratorium Kesehatan	6
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	41
12	Dinas Perikanan	23
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	22
14	Dinas Lingkungan Hidup	59
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	24
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	145
18	Dinas Perhubungan	39
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
21	Dinas Sosial	26
22	RSUD	334
23	Satpol PP	45
24	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	62
25	Dinas PPKB dan PPPA	15

No	Instansi	JML
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	26
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	28
29	Kecamatan	203
30	Kecamatan Arjosari	20
31	Kecamatan Bandar	18
32	Kecamatan Donorojo	16
33	Kecamatan Kebonagung	17
34	Kecamatan Nawangan	15
35	Kecamatan Ngadirojo	21
36	Kecamatan Pacitan	16
37	Kecamatan Pringkuku	15
38	Kecamatan Punung	16
39	Kecamatan Sudimoro	13
40	Kecamatan Tulakan	22
41	Kecamatan Tegalombo	14
42	Kelurahan	24
43	Kelurahan Baleharjo	5
44	Kelurahan Pacitan	3
45	Kelurahan Ploso	5
46	Kelurahan Pucangsewu	5
47	Kelurahahan Sidaharjo	6
JUMLAH		**7.228**

Sesuai dengan data dinding pegawai Kabupaten Pacitan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 jumlah keseluruhan pegawai sejumlah 7.228 orang, tersebar disemua Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung dan pelaksanaan urusan pemerintah yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah.

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 218 tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Pacitan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2022.

Maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 secara lengkap sebagai berikut :

Tabel. 1.6

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angggaran 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.628.450.361.144,00**	**1.657.537.661.332,69**	**101,79**
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154.616.728.818,00	166.703.135.564,69	**107,82**
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.452.920.329.141,00	1.469.886.878.203,00	**101,17**
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.913.303.185,00	20.947.647.565,00	**100,16**
B	**BELANJA DAERAH**	**1.809.855.387.663,00**	**1.663.713.823.139,37**	**91,93**
1	BELANJA OPERASI	**1.270.055.030.442,00**	**1.148.606.837.198,44**	**90,44**
2	BELANJA MODAL	**258.881.714.066,00**	**236.407.316.014,93**	**91,32**
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	**7.282.496.959,00**	**7.135.327.673,00**	**97,98**
4	BELANJA TRANSFER	**273.636.146.196,00**	**271.564.342.253,00**	**99,24**
	Jumlah Belanja	**1.809.855.387.663,00**	**1.663.713.823.139,37**	**91,93**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**-181.405.026.519,00**	**-6.176.161.806,68**	**3,4**
C	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**362.810.053.038,00**	**362.806.893.038,34**	**100**
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**181.405.026.519,00**	**181.403.446.519,17**	**100**
	PEMBIAYAAN NETTO	**181.405.026.519,00**	**181.403.446.519,17**	**100**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**175.227.284.712,49**	

Keterangan: - Data sebelum audit BPK

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi kepala daerah telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Pacitan.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga disesuikan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Isu strategis di Kabupaten Pacitan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. **Perlunya Keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak serta penyandang disabilitas.**

   Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada saat ini yang sudah mencapai 68% perlu diiringi dengan upaya terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu perlindungan pada perempuan dan anak atas kasus kekerasan dan pernikahan dini juga patut dijadikan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Pacitan, mengingat sejak tahun

   2017 sampai dengan tahun 2020, angka rasio KDRT mengalami tren peningkatan. Sehingga diperlukan upaya untuk mempercepat peningkatan advokasi dan fasilitasi pengarustamaan gender dan anak sehingga keberpihakan terhadap perempuan dan anak dapat terjamin. Keberpihakan pada disabilitas dan perempuan dalam rangka keberdayaan secara sosial dan ekonomi perlu dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan.

2. **Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Kemiskinan masih menjadi isu yang cukup menarik di Kabupaten Pacitan dimana pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan, Pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Pacitan 14,54 berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur yakni 11,09 dan angka kemiskinan Nasional 10,19 angka tersebut juga ditunjang oleh tingginya jumlah PPKS. Melalui upaya pemerataan pembangunan maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat ikut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui bantuan sosial terhadap masyarakat yang masuk pada kategori PPKS. Solusi dalam permasalahan kemiskinan adalah melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Ketepatan sasaran dan pengawasan mutlak harus dilakukan sehingga dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat miskin. Selain itu harus didukung oleh validasi Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah secara bertahap.

3. **Tuntutan terciptanya kondusifitas lingkungan yang aman dan tertib**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan rasa aman guna menunjang efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Untuk mewujudkan situasi kondisi masyarakat dengan tertib dan tentram dibutuhkan aturan hukum, guna menumbuhkembangkan sikap disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang atau kelompok masyarakat, berbudi pekerti luhur, taat hukum, kesusilaan dan keagamaan sehingga terwujud harmonisasi sosial. Dalam rangka menjamin dan memberikan rasa aman bagi masyarakat maka perlu didukung sumber daya aparatur yang berkualitas dan kapabel demi tercapainya stabilitas dalam menjalankan pemerintahan daerah.

4. **Urgensi Penguatan Ekonomi sektor unggulan sebagai magnet investasi untuk menyerap tenaga kerja dan peningkatan PAD**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata memiliki proporsi sebesar 10,87% yang artinya dengan angka tersebut maka perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu bentuk kemandirian daerah agar tidak berketergantungan pada pemerintah pusat. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan PAD adalah dengan

mengupayakan peningkatan sektor unggulan, dalam hal ini Kabupaten Pacitan memiliki potensi di bidang Pariwisata. Pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pariwisata dengan pendekatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu potensi pertanian juga menjadi aspek yang cukup penting yang bisa dikembangkan melalui pertanian berbasis kawasan agar masyarakat petani dapat terlibat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan masyarakat petani yang mempunyai potensi untuk dikerjasamakan dengan berbagai pihak yang dapat menunjang kebutuhan produksi pertanian masyarakat. Kemudian juga perlu didukung oleh kemudahan dan peluang investasi bagi investor dalam rangka pemenuhan fasilitas pendukung serta pembangunan pada kawasan wisata dan pertanian. Dengan demikian maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dan pajak daerah.

5. **Pentingnya penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyongsong Industri 4.0**

Perkembangan teknologi menuntut segala aspek kehidupan untuk berkembang lebih cepat dengan menyesuaikan perkembangan jaman, sektor pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan juga diharapkan dapat bersaing dalam kemajuan penggunaan teknologi, penguatan kapasitas petani dan nelayan perlu di tingkatkan guna meningkatkan efektifitas produksi pertanian. pertumbuhan produktivitas padi dan bahan utama sektor lainnya tercatat memiliki tren yang meningkat namun belum signifikan yakni meningkat sebesar 0,35

KW/HA, sektor perikanan kelompok nelayan memiliki fluktuasi pada nilai produksinya, tercatat pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan namun meningkat pada tahun 2020. Wisatawan baik lokal maupun manca negara rata-rata memiliki pengetahuan yang cukup dinamis terkait kemajuan teknologi sehingga pelaku usaha pada sektor pariwisata juga dituntut agar dapat menyesuaikan kapasitasnya guna menyongsong industri 4.0 yakni

kombinasi antara mekanisme mesin, kecerdasan buatan dan konektivitas internet. Oleh karena itu dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

6. **Tuntutan pembangunan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi Kabupaten Pacitan**

Penyediaan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi, bandara dan pelabuhan menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu infrastruktur teknologi melalui pemerataan internet juga menjadi daya dorong yang sangat penting, dengan semakin mudahnya akses trasnportasi dan komunikasi dapat memudahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tercatat bahwa persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah sebesar 66,78% dari target akhir 2021 mencapai 65,93% sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun

2020 adalah 93,54 dengan target akhir adalah 93,63%. Infrastruktur tidak hanya dituntut untuk terpenuhi saja tetapi bagaimana konektivitasnya bisa terjamin dalam rangka menggerakkan ekonomi berbasis potensi unggulan khususnya disektor pariwisata dan pertanian. Dalam pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kemanfaatan, kemudahan, dan konektivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Selain itu Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan provnsi Jawa Tengah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menangkap peluang dan banyaknya proyek strategis nasional yang direncanakan di Kabupaten Pacitan.

Pentingnya pemenuhan Infrastruktur dasar dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana

Kabupaten Pacitan sebagai kawasan pesisir dan rawan longsor, maka Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan mutlak harus dijadikan dasar dalam tata kelola mitigasi bencana. Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Pendidikan Mitigasi Bencana (Bencana Alam, Non-Alam dan wabah) harus dilakukan secara berkala serta menghidupkan kembali SISKLAMING dan Perondaan di lingkungan RT. Selain itu upaya penanggulangan bencana atau kesiapsiagaan berbasis

daerah yang diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana penunjang.

7. **Belum optimalnya penguatan Pendidikan karakter dengan integrasi Pendidikan formal dan kebangsaan**

Pendidikan karakter menjadi salah satu isu besar aspek pendidikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hal ini menyusul adanya dampak globalisasi yang mulai mengikis budaya dan karakter bangsa, terfokusnya pendidikan pada

bidang ilmu pengetahuan berdampak pada terkesampingnya nilai-nilai karakter sehingga generasi muda cenderung kurang memperhatikan norma sosial, budaya dan agama. Oleh karenanya pendidikan karakter harus tetap di tekankan agar dapat menciptakan generasi yang berwawasan tinggi melalui pendidikan formal serta berbudi luhur melalui pendidikan karakter.

8. **Tuntutan Pemenuhan Kualitas Pelayanan Pendidikan**

Permasalahan utama dan tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan adalah pemerataan standart pendidikan, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang tercukupi dengan luas area yang cukup besar dan kontur geografis yang bermacam-macam. Dalam rangka menjamin pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan perlu upaya pemerintah antara lain, melalui jalur afirmasi bagi siswa tidak mampu, memberikan beasiswa bagi siswa berpotensi dan siswa dari keluarga kurang sejahtera serta memperluas cakupan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum sekolah. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi tenaga pendidik dan kemudahan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat serta peningkatan sarana dan prasana pendidikan melaui standarisasi akreditasi serta mengembangkan sistem layanan dan pembelajaran berbasis digital.

9. **Tuntutan peningkatan standar kualitas layanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan dapat dilihat dari rasio puskesmas dan pustu per satuan penduduk serta rasio rumah sakit per satuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang belum menunjukan peningkatan, sedangkan untuk Rumah sakit di Kabupaten Pacitan masih berada pada tipe C. Peningkatan akses layanan dan mutu kesehatan kepada seluruh masyarakat pacitan sangat penting untuk menjamin kualitas Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan harus ditingkatkan. Dengan merebaknya

Virus Covid 19 tentu menjadi kekhawatiran yang cukup besar terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah perlu mempersiapkan layanan berbasis digital dan mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kualitas sarana kesehatan baik dari level rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu. Disisi yang lain kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian diantaranya melalui pemenuhan gizi dan pemantauan

tumbuh kembang anak dan terus mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

10. **Urgensi akselerasi inovasi layanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah**

Isu Pelayanan akan tetap ada dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Upaya untuk menjawab hal tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi-inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Untuk mendukung inovasi pelayanan yang dapat menyentuh masyarakat maka pemerintah perlu melakukan breakdown pelayanan di level setidaknya di level desa agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Pemanfaatan media Big Data atau One Data masih menjadi isu yang cukup berkembang di Pemerintahan daerah. Selain itu sistem tatakelola pemerintahan di Kabupaten Pacitan juga masih perlu mendapatkan perhatian. Indeks reformasi birokrasi menjadi cerminan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas kinerja sumberdaya aparatur dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah. Peningkatan kualitas SDM aparatur menjadi mutlak harus dilakukan agar bisa responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mengarahkan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi (E-Government). Salah satu upaya yang dapat didorong adalah melalui penguatan dan integrasi antar pemerintah utamanya pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki hubungan secara langsung terhadap berbagai permasalahan di masyarakat.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 1995 Kabupaten Pacitan mempunyai semboyan **"TATA PRAMANA HARGENG PRAJA"** yang mengandung makna filosofis tekad pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif, bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang Adil, Makmur Tata Tentrem Kerto Raharjo dengan kondisi wilayah berbukit-bukit selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 disebutkan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pacitan

guna menunjang perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 20 tahun ke depan. Untuk memudahkan dalam menentukan arah pembangunan dan mampu menjangkau segenap aspek kehidupan, maka arah pembangunan di Kabupaten Pacitan 20 tahun diarahkan melalui strategi Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Pacitan.

Adapun Visi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah "Kabupaten Pacitan yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai Nilai Agama dan Budaya" Keberhasilan pencapaian visi tersebut ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Misi Jangka Panjang

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil;
4. Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya;
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Guna memberikan arahan pelaksanaan yang lebih jelas perlu ditentukan tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan (RPJMD) dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan pokok Kepala Daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti diabaikannya pembangunan di bidang lainnya. Hal itu semata-mata menunjukan penekanan atau prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan.

Periode saat ini memasuki pembangunan tahap IV (2021-2026) yaitu Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan Nasional. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan peran daerah yang menonjol dalam pembangunan di Jawa Timur dan lingkup Nasional. Khusus dalam konteks regional Jawa Timur, hal yang akan diwujudkan adalah mendayagunakan seluruh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan

yang telah terbangun, khususnya di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata, sehingga menjadi kabupaten berbasis industri pertanian, kelautan dan pariwisata yang paling diperhitungkan. Segenap pencapaian yang diraih pada tahapan sebelumnya menjadi pijakan yang di gunakan semaksimal mungkin untuk menjadi Kabupaten yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya

Sejalan dengan arah pembangunan Lima Tahunan Tahap 4 maka ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun. Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah serta mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, maka ditetapkan visi Kabupaten Pacitan periode 2021 – 2026. Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2021 – 2026 adalah “MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”.

Apabila dijabarkan visi ”Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” bermakna bahwa visi pembangunan dalam periode 2021-2026 bertujuan mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga sisi lainnya yaitu kualitas masyarakat yang meningkat dan nantinya akan berujung pada terwujudnya kebahagiaan masyarakat Pacitan lahir dan batin.

Misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

Empat butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas

dalam memahami butir misi, maka berikut adalah gambaran konstruksi dalam pencapaian Visi Pembangunan melalui 4 (empat) misi pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pacitan periode tahun 2021-2026:

Gambar 1.1

Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

Berdasarkan gambar di atas, dalam mencapai visi pembangunan "Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia" maka harus terbangun 2 Pilar Utama yaitu pertumbuhan ekonomi sektor unggulan (misi 3) dan Pembangunan dan peningkatan daya saing SDM (misi 2). Tercapainya 2 Pilar Utama tersebut harus di dukung dengan 2 Pondasi Pembangunan. Pondasi utama adalah terkait dengan misi ke 1 yaitu Pemerataan Pembangunan Infrastuktur. Setelah itu sebagai pondasi utama adalah pemerintahan yang inovatif, profesional dan melayani.

Misi kesatu dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Misi kedua dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan

menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Misi ketiga dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Misi keempat dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara profesional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Apabila keempat misi tersebut dapat diwujudkan, maka visi pembangunan Kabupaten Pacitan ”Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan tercapai dengan indikator kinerja yang dibagi menjadi 5 (lima) aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Urusan Pilihan, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Urusan Penunjang.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Sedangkan tolok ukur yang digunakan adalah :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Angka Kemiskinan
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Indeks Reformasi Birokrasi

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. PDRB Perdagangan Besar dan Eceran
3. PDRB Industri Pengolahan
4. Pengeluaran Perkapita
5. Pendapatan Perkapita

6. Indeks Gini
7. Persentase Pertumbuhan PAD
8. Indeks Pendidikan
9. Indeks Kesehatan
10. Indeks Infrastruktur
11. Indeks Kebahagiaan
12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
14. Persentase Desa Mandiri
15. Indeks Daya Saing Pariwisata
16. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
17. Nilai Sakip
18. Opini BPK
19. Maturitas SPIP
20. Indeks Profesionalitas Aparatur
21. Indeks SPBE
22. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambaran keselarasan RPJMD 2021-2026 dengan RPJPD 2005-2025 sebagaimana gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2

Keterkaitan Visi Misi RPJPD dan Visi Misi RPJMD

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni "Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup", maka tujuan pembangunan adalah "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif Dan Adil" dengan sasaran:

a. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksessibilitas.
b. Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni "Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa", maka tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan Bahagia, dengan sasaran :
   1. Meningkatnya Kualiltas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan.
   2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
   3. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat.
   4. Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan.
   5. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat.
b. Tujuan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan, dengan sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya", maka tujuan yang ditetapkan adalah "Meningkatkan Daya Saing Perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan" dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.
3. Meningkatnya daya Saing Pariwisata
4. Meningkatnya Nilai Investasi.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani", maka tujuan yang ditetapkan adalah "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif" dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif
2. Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah
3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan
4. Meningkatnya Kemandirian Desa

C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026

Dalam visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dirumuskan dan ditetapkan menjadi program unggulan pembangunan daerah dengan mencermati, menganalisis dan memperhatikan kaidah-kaidah teknokratik dan aturan penyusunan RPJMD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pacitan "Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera". Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2021-2026 terdapat beberapa kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program-program pembangunan yang lain. Kebi 7jakan dan program unggulan yang dimaksud, yaitu :

1. **Misi Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dan Pembangunan Wilayah Perbatasan, Dengan Tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup**

   Adapun Program Prioritas adalah :

   1. Program Penyelenggaraan Jalan.
   2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
   3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   4. Program Kawasan Permukiman
   5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   7. Program Pengelolaan Persampahan
   8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
   9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
   10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2. **Misi Mewujudkan Pembangunan Dan Peningkatan Daya Saing Sdm Yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Bangsa.**

   Adapun Program Prioritas adalah :

   1. Program Pengelolaan Pendidikan
   2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   3. Program Pengembangan Kebudayaan
   4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
   7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   8. Program Pemberdayaan Sosial
   9. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

3. **Misi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dari Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya.**

   Adapun Program Prioritas adalah :

   1. Program Pengembangan UMKM
   2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
   3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   4. Program Promosi Penanaman Modal
   5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   6. Program Pelayanan Penanaman Modal
   7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   9. Program Pemasaran Pariwisata
   10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   11. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   14. Program Penyuluhan Pertanian
   15. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   16. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   17. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4. Misi Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani.

Adapun Program Prioritas adalah :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Pengawasan
6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Program Kepegawaian Daerah
10. Program Penataan Desa
11. Program Peningkatan Kerjasama Desa
12. Program Administrasi Pemerintahan Desa
13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
14. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah hingga kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7

Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan RKPD Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;	**Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata**	**Pembangunan Sektor Ekonomi Unggulan Pendukung Pariwisata;**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka**	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
					Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab./Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	Dinas Koperasi Usaha Mikro

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah**	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Mikro

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Mikro
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi Usaha Mikro
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Penyuluhan Transmigrasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Pelatihan Transmigrasi	Dinas Koperasi Usaha

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
						Mikro
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Koperasi Usaha Mikro
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Pelayanan antar Kerja	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Mikro
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Koperasi Usaha Mikro
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Dinas Koperasi Usaha Mikro

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Kabupaten/Kota		
					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Dinas Koperasi Usaha Mikro
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga	Dinas Koperasi Usaha Mikro

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Kerja serta Pengupahan	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	Dinas Koperasi Usaha Mikro

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Daerah Kabupaten/Kota	
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Koperasi Usaha Mikro
			PROGRAM PENGEMBANGANIKLIM PENANAMANMODAL	Penetapan PemberianFasilitas/InsentifDibidang PenanamanModalyangmenjadiKewenanganDaerahKabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				PembuatanPetaPotensiInvestasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			PROGRAM PROMOSIPENANAMANMODAL	PenyelenggaraanPromosiPenanamanModalyangmenjadiKewenanganDaerahKabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			PROGRAM PELAYANANPENANAMANMODAL	PelayananPerizinandanNonPerizinansecaraTerpadu SatuPintudibidang PenanamanModalyan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				gmenjadiKewenangan DaerahKabupaten/Kota	Terintegrasi secara Elektronik	
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			PROGRAM PENGENDALIANPELAKSANAANPENANAMANMODAL	PengendalianPelaksanaanPenanamanModalyangmenjadiKewenanganDaerahKabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Koordinasi dan SinkronisasiPembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAANDATADANSISTEMINFORMASIPENANAMANMODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			PROGRAM PENGELOLAANPERIKANANTANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan d iWilayah Sungai,Danau,Waduk, Rawa,dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan KapasitasNelayan Kecil	Dinas Perikanan
					Pelaksanaan	Dinas Perikanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					FasilitasiPembentukan danPengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Pelaksanaan FasilitasiBantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan ProsedurPengelolaan danPenyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan
					Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan KapasitasPembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
					Pelaksanaan FasilitasiBantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
					Pemberian	Dinas Perikanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pendampingan,Kemudahanan Akses IlmuPengetahuan, Teknologi danInformasi, sertaPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data danInformasi PembudidayaanIkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
					Penyediaan PrasaranaPembudidayaan Ikan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
					Pengelolaan Kesehatan Ikandan Lingkungan Budidayadalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Dinas Perikanan
					Pembinaan dan PemantauanPembudidayaan Ikan diDarat	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil	Pelaksanaan Bimbingan danPenerapan	Dinas Perikanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persyaratan atauStandar pada UsahaPengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan KetersediaanIkan untuk Konsumsi danUsaha Pengolahan dalam 1(satu) DaerahKabupaten/Kota	Dinas Perikanan
					Pemberian Fasilitas bagiPelaku Usaha PerikananSkala Mikro dan Kecil dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan PenggunaanSarana Pendukung Pertaniansesuai dengan Komoditas,Teknologi dan SpesifikLokasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pendampingan PenggunaanSarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Peningkatan Kualitas SDGHewan/Tanaman	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Pemanfaatan SDGHewan/Tanaman	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pemeriksaan Mutu, Khasiatdan Keamanan PeredaranObat Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/BibitTernak yang Sumbernya dariDaerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan JalanUsaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasidan Pemeliharaan DAM Parit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pembangunan,	Dinas Ketahanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Rehabilitasidan Pemeliharaan PrasaranaPertanian Lainnya	Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian danPenanggulangan PenyakitHewan dan Zoonosis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan JasaMedik Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian OrganismePengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura, danPerkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan KapasitasKelembagaan PenyuluhanPertanian di	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Kecamatan danDesa	
					Pengembangan KapasitasKelembagaan Petani diKecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Penyediaan danPemanfaatan Sarana danPrasarana PenyuluhanPertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan SuratIzin Usaha PerdaganganMinuman BeralkoholGolongan B dan C	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan danPengendalian PengelolaSarana DistribusiPerdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan SinkronisasiKetersediaan BarangKebutuhan Pokok danBarang Penting di TingkatAgen dan Pasar Rakyat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting padaPelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	DistribusiBarang dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	
					Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khususyang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pameran Dagang Lokal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan MetrologiLegal, Berupa Tera, TeraUlang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penyidikan Metrologi Legal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri di TingkatKabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan RencanaPembangunan IndustriKabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran danPerwilayahan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan AnalisisData Industri, Data KawasanIndustri serta Data LainLingkup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kotamelalui Sistem InformasiIndustri Nasional (SIINas)	
Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;	**Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur**	**Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan;**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dinas PU dan PR
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Dinas PU dan PR
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Ekonomi dan Pelayanan	**Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi**				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Dinas PU dan PR

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Dasar;						
					Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Dinas PU dan PR
					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas PU dan PR
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;	**Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup**				Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Dinas PU dan PR
					Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Dinas PU dan PR
					Rehabilitasi Tanggul Sungai	Dinas PU dan PR
					Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas PU dan PR
					Normalisasi/Restorasi Sungai	Dinas PU dan PR

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Dinas PU dan PR
					Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PU dan PR
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dinas PU dan PR
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas PU dan PR
					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas PU dan PR
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas PU dan PR
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas PU dan PR

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PU dan PR
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PU dan PR
					Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PU dan PR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas PU dan PR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas PU dan PR
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas PU dan PR
					Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Dinas PU dan PR

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dinas PU dan PR
					Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PU dan PR
					Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PU dan PR
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dinas PU dan PR
					Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas PU dan PR

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dinas PU dan PR
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas PU dan PR
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dinas PU dan PR
					Pembangunan Jalan	Dinas PU dan PR
					Rehabilitasi Jalan	Dinas PU dan PR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Dinas PU dan PR
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas PU dan PR
					Pembangunan Jembatan	Dinas PU dan PR
					Rehabilitasi Jembatan	Dinas PU dan PR
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dinas PU dan PR
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Dinas PU dan PR

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Badan Usaha Jasa Konstruksi	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas PU dan PR
					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas PU dan PR
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dinas PU dan PR
					Sistem Informasi Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Dinas PU dan PR

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Kabupaten/Kota		
					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD
					Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
					Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD
					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
					Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Sementara Limbah B3	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah**	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di BidangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Pengelolaan Sampah**	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
					Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Kabupaten/Kota	
					Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Dinas Perhubungan
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
					Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Dinas Perhubungan
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
					Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Dinas Perhubungan
					Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Dinas Perhubungan
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot**a	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	**Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan**	**Layanan Pendidikan, Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi;**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dinas Pendidikan
					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan
					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Kantin Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Kantin Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Kelembagaan dan	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh**	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Masyarakat	yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
					Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
				Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penting	
					Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
					Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
				Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
					Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawab-kan	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas Kepedndudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Bahan HabisPakai	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Produktif	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan KewaspadaanDini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Sarana FasilitasPelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak KewenanganKabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
						Penduduk dan Keluarga Berencana
					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Peningkatan Kesertaan KB Pria	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
					Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PengelolaanPerpustakaanTingkat DaerahKabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dinas Perpustakaan
					Pengembangan Perpustakaan di TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan
					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
					Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan	Dinas Perpustakaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan
					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan
					Penyusunan Data dan Informasi PerpustakaanTenaga Perpustakaan danPustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan
				PembudayaanGemar MembacaTingkat DaerahKabupaten/Kota	Sosiaisasi Budaya Baca danLiterasi pada SatuanPendidikan Dasar danPendidikan Khusus sertaMasyarakat	Dinas Perpustakaan
					Pembangunan dan Pemeliharaan SaranaPerpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan
					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan
			PROGRAM PENGELOLAANARSIP	PengelolaanArsipDinamisDaerahKabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan
					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan
				PengelolaanArsipStatisDaerahKabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dinas Perpustakaan
			PROGRAM PERLINDUNGANDANPENYELAMATANARSIP	PemusnahanArsipDilingkunganPemerintahDaerahKabupaten/KotayangMemilikiRetensidiBawah10(sepuluh)Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dinas Perpustakaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
		Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19;	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	SATPOL PP
					Penindakan atas	SATPOL PP

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	SATPOL PP
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	SATPOL PP
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	SATPOL PP

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP
					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	SATPOL PP
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SATPOL PP

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SATPOL PP
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	SATPOL PP
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	SATPOL PP
					Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	SATPOL PP
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	SATPOL PP
			PROGRAM	Pengembangan	Peningkatan Kemampuan	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PEMBERDAYAAN SOSIAL	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;	**Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal**	**Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan
					Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembinaan Sejarah	Kepemudaan dan Olah Raga
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Penetapan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Dinas Pemberdayaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Masyarakat dan Desa
					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Penyusunan ProfilDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Layanan Hubungan Media	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Elektronik	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral diDaerah	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka pemerintah Kabupaten Pacitan wajib melaksanakan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 dilihat dengan perencaan pembangunan yang memprioritaskan penanganan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tersebut dibawah ini :

A. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar Pertimbangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

B. Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
2) Permedagri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3) Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah.
4) Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5) Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidan Kesehatan.
6) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
7) Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 / / KPTS / 408.12/2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan.

C. Kebijakan Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026., kebijakan dan program diarahkan untuk pencapaian Visi Kabupaten Pacitan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa jenis layanan dasar, sedangkan program yang tidak terkait langsung merupakan urusan pilihan dan potensial dikembangkan di Kabupaten Pacitan.

Adapun program – program dan kegiatan yang diarahkan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk pencapaian target SPM tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8

Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	**PELAKSANA PROGRAM**
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

Tabel 1.9

Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
	Upaya Kesehatan		

Tabel 1.10
Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PU PR**
2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan sarana dan prasrana air limbah	

Tabel 1.11
Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pengembangan perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

Tabel 1.12
Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM

Bidang Ketrentaman dan Ketertiban Tahun 2022

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	SATPOL PP
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD

Tabel 1.13
Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
Bidang Sosial Tahun 2022

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	**Program Rehabilitasi Sosial**	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
2	**Program Penanganan Bencana**	2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

Program dan kegiatan lain, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan bersifat mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada masing-masing bidang.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro adalah gambaran secara umum keberhasilan penyelanggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan menggerakan ekonomi masyarakat. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten pihak swasta dan pihak terkait dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pacitan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan Pendapatan per Kapita. Indikator tersebut adalah dampak *(Impact)* dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pihak Swasta dan Pihak terkait dalam pembangunan nasional.

Dalam satu tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro pemerintah daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.1

Indikator kinerja makro Kabupaten Pacitan tahun 2021 – 2022

NO	URAIAN	TAHUN	
		2021*	**2022****
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68.57	69,37
2	Angka Kemiskinan (%)	15.11	13,80
3	Angka Pengangguran (%)	2.04	3,65
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2.49	5,54
5	Pendapatan per kapita (rupiah)	27,81 (juta Rupiah)	30,34 (juta Rupiah)
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.337	0,338

*Ket : * angka perbaikan*
*** angka sementara*

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 mengalami kenaikan 3,05% dibandingkan tahun 2021. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mencapai 5,54 % sedangkan tahun 2021 hanya mencapai 2,49 %.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2022 mencapai 69,37%, meningkat 0,80% dari tahun sebelumnya.

Angka Kemiskinan dengan kondisi tahun 2021 sejumlah 15,11 % dari total jumlah penduduk dan menurun pada tahun 2022 mencapai 13,8 % atau mengalami penurunan sebesar 1,3 %. Penurunan tersebut diakibatkan karena adanya upaya pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi covid 19 yang membuat perekonomian nasional merangkak meningkat stabil.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2021 mencapai 2.04% dan naik 1,61% pada tahun 2022 mencapai 3,65 %.

Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 sebesar Rp. 27.310.000,00. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.030.000,00 menjadi sebesar Rp. 30.340.000,00.

Sedangkan ketimpangan pendapatan (gini ratio) pada tahun 2021 sebesar 0,337 % meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,338 % atau 0,001 %.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat merupakan tujuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya tugas pembantuan dan pemberian otonomi secara luas. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional dan kemudian pemerintah nasional membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas -luasnya. Pemberian otonomi secara luas serta adanya tugas pembantuan, memberikan konsekuensi bagi daerah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemberian otonomi yang seluas - luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016. Selanjutnya pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPD) kepada masyarakat.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/ kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing - masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Adapun dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, secara teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, format laporan Kepala Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan pada urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang diklasifikasikan menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebanyak 18, Urusan Pilihan sebanyak 6 dan Urusan Penunjang Pemerintahan sebanyak 5.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2022 bedasarkan dengan Indikator Kinerja Kunci Keluaran setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian kinerja kunci keluaran setiap urusan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Derah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	2	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak …..	459 Unit	
			3	2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak …..	150 Orang	
			4	3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak …..	174 Orang	
			5	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak …..	2249 Orang	
			6	5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak …..	2166 Orang	
			7	6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Sebanyak …..	547 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			8	7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Sebanyak …..	259 Orang	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	11	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sebanyak …..	487 Unit	
			12	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak …..	92 Orang	
			13	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak …..	146 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			14	4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak …..	33323 Orang	
			15	5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak …..	14065 Orang	
			16	6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak …..	3437 Orang	
			17	7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak …..	1112 Orang	
			18	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak …..	4044 Orang	
			19	9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak …..	1343 Orang	
			20	10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak …..	836 Orang	
			21	11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak …..	216 Orang	
			22	12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak …..	528 Orang	
			23	13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak …..	396 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			24	14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak …..	1778 Orang	
			25	15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak …..	824 Orang	
			26	16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak …..	418 Orang	
			27	17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak …..	71 Orang	
			28	18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sebanyak …..	517 Orang	
			29	19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sebanyak …..	385 Orang	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum	31	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak …..	18 Unit	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	32	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak …..	2405 Orang	
			33	3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak …..	500 Orang	
			34	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak …..	392 Orang	
			35	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak …..	142 Orang	
			36	6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sebanyak …..	142 Orang	
			37	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak …..	19 Orang	
			38	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sebanyak …..	19 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	40	1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sebanyak …..	3 Unit	
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	42	1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sebanyak …..	1 Unit	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	44	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Tetasus Difetri (Td) 2 . Tablet Tambah Darah 3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin 4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 5 . Buku KIA , dll	5	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			45	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sebanyak …..	257 Orang	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	47	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti : 1 . Formulir Photograf 2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 3 . Buku KIA , dll	3	
			48	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sebanyak …..	257 Orang	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti :	6	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					1 . Vaksin Hepatitis BO 2 . Vitamin K1 Injeksi 3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik 4 . Formulir Bayi Baru Lahir , 5. Formulir MTBM 6 . Buku KIA , dll		
			51	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Sebanyak …..	341 Orang	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	53	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik	7	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					seperti : 1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2 . Formulir DDTK 3 . Vitamin A Biru , Vitamin A Merah 4 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB - Hib * Campak Rubell , 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB - Hib * Campak Rubella 6 . Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA , dll		
			54	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sebanyak …..	341 Orang	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- ---- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di	(58,320 / 61,297) = 95.1433 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					Kabupaten/Kota		
			56	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Raport Kesehatanku 2 . Buku Pemantauan Kesehatan 3 . Kuesioner Skrining Kesehatan 4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 6 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah , dll	5	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			57	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sebanyak …..	342 Orang	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	59	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti : 1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) , Dll	3	
			60	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak …..	168 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti : 1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3 . Buku Kesehatan Lansia , Dll	3	
			63	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak …..	120 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti : 1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2 . Tensimeter 3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM , Dll	3	
			66	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak …..	168 Orang	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti :	3	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM 3 . Pedoman dan Media KIE , Dll		
			69	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak …..	158 Orang	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	71	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti :	4	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia 2 . Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 3 . Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 4 . Media KIE , Dll		
			72	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak …..	144 Orang	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	74	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti :	7	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 2 . Reagen Zn TB 3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 4 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering 5 . Catridge Tes Cepat Molekuler 6 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur , Dll		
			75	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak …..	144 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	77	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ….. Dukungan Logistik seperti : 1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner 2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 4 . Lainnya...	3	
			78	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak …..	144 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	81	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas …..	1439,22 Ha	
			82	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang ….	27540 Meter	
			83	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas …..	0 Ha	Tidak ada data yang terkait itu
			84	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang ….	2706 Meter	
			85	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak	Tidak ada data yang terkait itu

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			86	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak	Tidak ada data yang terkait itu
			87	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	1 Sarpras	Tidak ada data yang terkait itu

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	89	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ---------- X 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	(283,297 / 667,134) = 42.4648 %	
			90	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ---------- X 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	(34,692 / 667,134) = 5.2002 %	
			91	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ---------- X 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)		Ranah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	93	1. Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Adanya dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Ada	
			94	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Ada	
			95	3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaran SPAM	Sebanyak …..	1 BUMD/UPTD	
			96	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sebanyak …..	1 Izin	
			97	5. Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Sebanyak …..	0 Kerjasama	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	Sebanyak …..	0 Rumah	
			100	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sebanyak …..	0 Rumah	
			101	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sebanyak …..	142136 Rumah	
			102	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sebanyak …..	0 Rumah	
			103	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	Sebanyak …..	0 Rumah	
			104	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sebanyak …..	0 Rumah	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			105	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	∑ Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ---------- X 100% ∑ Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha		
			106	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	∑ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ---------- X 100% ∑ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha		
			107	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	∑ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ---------- X 100% ∑ rumah di wilayah pengembangan SPALD T		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			108	10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	∑ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat ---------- X 100% ∑ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		
			109	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	∑ Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ---------- X 100% ∑ Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota		
			110	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	∑ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ---------- X 100% ∑ Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			111	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	∑ Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD ---------- X 100% ∑ Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kabupaten/Kota		
			112	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	∑ Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot ---------- X 100% ∑ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S		
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	114	1.Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	∑ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku	(100 / 117) = 85.4701 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					---------- X 100% ∑ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)		
			115	2.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun eksisting	Sebanyak …..	100 Izin	
			116	3.Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Tidak	Tidak ada data yang terkait itu
			117	4.Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan Keputusan (Ada/Tidak)	Tidak	Tidak ada data yang terkait itu
			118	5.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sebanyak …..	0 Bangunan	Tidak ada data yang terkait itu
			119	6.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan srategis daerah provinsi	Sebanyak …..	0 Bangunan	Tidak ada data yang terkait itu
			120	7.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	70 Bangunan	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			121	8.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	Sebanyak …..	5 Bangunan	
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	123	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kabupaten/Kota	Sepanjang ….	1374 KM	
			124	2. Panjang jalan yang dibangun	Sepanjang ….	29,747 KM	
			125	3. Panjang jembatan yang dibangun	Sepanjang ….	36 Meter	
			126	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sepanjang ….	29,747 KM	
			127	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sepanjang ….	0 Meter	Tidak ada data yang terkait itu
			128	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Sepanjang ….	9,843 KM	
			129	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sepanjang ….	12 Meter	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			130	8. Panjang jalan yang dipelihara	Sepanjang ….	20,717 KM	
			131	9. Panjang jembatan yang dipelihara	Sepanjang ….	2,5 Meter	Tidak ada data yang terkait itu
		Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	133	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	48 Orang	
			134	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	48 Orang	
			135	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	48 Orang	
			136	4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	Ada	
			137	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			138	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak	Ada	
			139	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/Tidak	Ada	
			140	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/Tidak	Ada	
			141	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	
			142	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada/Tidak	Ada	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			143	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	Ada/Tidak	Ada	
			144	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	
			145	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinan di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	
			146	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/Tidak	Tidak	
			147	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Ada	
			148	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			149	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segementasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Ada	
			150	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	0 Badan Usaha	
			151	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	0 Badan Usaha	
			152	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	0 Badan Usaha	
			153	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	48 Badan Usaha	
			154	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sebanyak …..	0 Izin	
			155	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak …..	0 Pengawasan	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			156	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak …..	0 Kecelakaan Konstruksi	
			157	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak …..	0 Pengawasan	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	160	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sebanyak …..	10 Rumah	
			161	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sebanyak …..	9 Rumah	
			162	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sebanyak …..	36 Orang	
			163	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak …..	9 Rumah	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			164	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak …..	9 Rumah	
			165	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak …..	9 Rumah	
			166	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sebanyak …..	12 Unit	
			167	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sebanyak …..	36 Orang	
			168	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Seluas …..	0 Ha	Tahun 2022 tidak ada kegiatan pengadaan tanah untuk pencadangan lahan untuk kejadian bencana

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	170	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak …..	0 Rumah Tangga	Tahun 2022 tidak ada masyarakat yang terdampak kegiatan relokasi program pemerintah daerah
			171	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak …..	0 Rumah Tangga	Tahun 2022 tidak ada masyarakat yang terdampak kegiatan relokasi program pemerintah daerah
			172	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak …..	0 Rumah Tangga	Tahun 2022 tidak ada masyarakat yang terdampak

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							kegiatan relokasi program pemerintah daerah
			173	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak …..	0 Rumah Tangga	Tahun 2022 tidak ada masyarakat yang terdampak kegiatan relokasi program pemerintah daerah
			174	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak …..	0 Rumah Tangga	Tahun 2022 tidak ada masyarakat yang terdampak kegiatan relokasi program pemerintah daerah

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			175	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Seluas …..	0 Ha	Tidak ada pengadaan tanah untuk pencadangan keadaan bencana
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	177	1.Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Seluas …..	12.8 Ha	
			178	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sebanyak …..	1880 Unit	
			179	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh	Seluas …..	12.8 Ha	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	181	1. Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	165.591 Rumah	
			182	2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Sebanyak …..	1880 Rumah	
			183	3. Jumlah rumah tidak layak huni	Sebanyak …..	17272 Rumah	
			184	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sebanyak …..	129 Rumah	
			185	5. Rasio rumah dan KK	Jumlah KK ---------- ---------- x 100% Jumlah total unit rumah	(215,135 / 165,591) = 129.9195 %	
			186	6. Jumlah rumah pembangunan baru	Sebanyak …..	58 Rumah	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	188	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sebanyak …..	30 Perumahan	
			189	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sebanyak …..	112679 Rumah	
			190	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sebanyak …..	744 Rumah	
			191	4. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	Sebanyak …..	744 Rumah	
			192	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sebanyak …..	5 Perumahan	
			193	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sebanyak …..	744 Rumah	
			194	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sebanyak …..	5 Pengembang	
			195	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sebanyak …..	5 Pengembang	
			196	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sebanyak …..	5 Pengembang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	198	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	Sebanyak …..	220 Pelanggaran dan Pengaduan	
			199	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sebanyak …..	510 Orang	
			200	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sebanyak …..	40 Perda & Perkada	
			201	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sebanyak …..	3 Orang	
			202	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguam trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguam trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada Ada Sebanyak 13 SOP	
			203	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedianya sarana prasarana minimal (Dibuat dalam bentuk daftar)	Ada	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	206	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- X 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	(1 / 1) = 100 %	
			207	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ---------- ---------- x 100% Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	(598,934 / 598,934) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	209	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- X 100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		
			210	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- X 100% Jumlah satu dokumenRenkon yang lengkap dan sudah disahkan	(1 / 1) = 100 %	
			211	3. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ---------- X 100% jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			212	4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan ---------- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		
			213	5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops ---------- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	(598,934 / 598,934) = 100 %	
			214	6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan ---------- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	(256,831 / 598,934) = 42.8814 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	216	1.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ---------- X 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	(1 / 1) = 100 %	
			217	2.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana ---------- X 100% Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana	(13 / 13) = 100 %	
			218	3.Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ---------- X 100% jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	(21 / 38) = 55.2632 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			219	4.Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ---------- X 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	(1 / 2) = 50 %	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	221	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	2 Layanan	
			222	2.Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	
			223	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	
			224	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Sebanyak ….. (Dibuat dalam bentuk daftar)	2 Pos	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			225	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sebanyak ….. (Dibuat dalam bentuk daftar)	101 Sarpras	
			226	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sebanyak …..	31 Orang	
			227	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sebanyak …..	20 Orang	
			228	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sebanyak …..	2 Kegiatan	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	231	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sejumlah …..	2 Layanan	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		luar panti (indikator SPM)	232	2. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Sebanyak …..	1334 Orang	
			233	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Sebanyak …..	1 Tim	
			234	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sebanyak …..	1334 Orang	
			235	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sebanyak …..	3 Unit	
			236	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Sebanyak …..	914 Orang	
			237	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sebanyak …..	19 Unit	
			238	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Sebanyak …..	0 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			239	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sebanyak …..	65 Orang	
			240	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Sebanyak …..	1 Peralatan	
			241	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Sebanyak …..	90 Paket	
			242	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sebanyak …..	90 Orang	
			243	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sebanyak …..	1 Orang	
			244	14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	Sebanyak …..	232 Orang	
			245	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Sebanyak …..	168 Orang	
			246	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sebanyak …..	5 Kegiatan	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			247	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sebanyak …..	1 Orang	
			248	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Sebanyak …..	157 Orang	
			249	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	Sebanyak …..	14 Orang	
			250	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sebanyak …..	14 Orang	
			251	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sebanyak …..	20 Orang	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	253	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sebanyak …..	350 Orang	
			254	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sebanyak …..	0 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			255	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sebanyak …..	12 Penampungan	
			256	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sebanyak …..	350 Paket	
			257	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Sebanyak …..	350 Orang	
			258	6. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	Sebanyak …..	232 Orang	
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	260	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota (Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku)	Ada	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			261	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% realisasi indikator - Target indikator ---------- X 100% Realisasi	(7 - 15) / 7 = - 114.2857 %	
			262	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	1 Perusahaan	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	264	1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n ---------- X 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	(9 / 22) = 40.9091 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			265	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ---------- X 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	(8 / 39) = 20.5128 %	
			266	3. Rasio jumlah isntruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ---------- X 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	(39 / 1,266) = 3.0806 %	
			267	4. Persentase LPK yang terakreditasi	LPK yang terakreditasi pada tahun n ---------- X 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n	(1 / 11) = 9.0909 %	
			268	5. Persentase LPK yang memiliki	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ---------- X 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	(11 / 11) = 100 %	
			269	6. Jumlah penganggur yang dilatih	Sebanyak …..	1226 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			270	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n ---------- X 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	(1,226 / 1,226) = 100 %	
			271	8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ---------- X 100% jumlah lulusan pada tahun n	(361,268 / 368,795) = 97.9590 %	
			272	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ---------- X 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	(22 / 1,226) = 1.7945 %	
			273	10. Jumlah Calon Pekerja MIgran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih ---------- X 100% Jumlah CPMI terdaftar	(139 / 139) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			274	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah Pelatihan CPMI yang dilaksanakan … ---------- X 100% Jumlah Pelatihan CPMI yang direncanakan pada tahun n Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		nihil karena CPMI karena tidak ada anggara n untuk pelatihan CPMI
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	276	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ---------- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	(1 / 73) = 1.3699 %	
			277	2. Data tingkat produktivitas total	Data tingkat produktivitas total (Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)).	-0,08	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	279	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n ---------- X 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	(38 / 33) = 115.1515 %	
			280	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n ---------- X 100% Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB	(2 / 2) = 100 %	
			281	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sebanyak …..	2 SP/SB	
			282	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah… ---------- X 100% Jumlah Perusahaan	(35 / 40) = 87.5 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		
			283	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ---------- X 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	(597 / 452) = 132.0796 %	
			284	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ---------- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	(5 / 73) = 6.8493 %	
			285	7. Jumlah mogok kerja	Sebanyak …..	nihil Mogok Kerja	nihil
			286	8. Jumlah penutupan perusahaan	Sebanyak …..	nihil Perusahaan	nihil
			287	9. Jumlah perselisihan kepentingan	Sejumlah …..	nihil Perselisihan	nihil
			288	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sejumlah …..	nihil Perselisihan	nihil

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			289	11. Jumlah perselisihan PHK	Sejumlah …..	nihil Perselisihan	nihil
			290	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sebanyak …..	nihil Orang	nihil
			291	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sejumlah …..	2 Perselisihan	
			292	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Ada/Tidak	Tidak	
			293	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah penjanjian bersama ---------- X 100% Jumlah kasus perselisihan	(2 / 4) = 50 %	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	295	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	2117 Lowongan Kerja	
			296	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	1048 Orang	
			297	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	31 BKK	
			298	4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	23 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			299	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sebanyak …..	3 Orang	
			300	6. Jumlah Lembaga Penempatam Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	nihil Lembaga	
			301	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	nihil Perjanjian	
			302	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sebanyak …..	445 Orang	
			303	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ---------- X 100% Jumlah CPMI/CTKI		
			304	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata sebanyak ….....	139 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			305	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan ---------- X 100% Jumlah PMI yang pulang	(35 / 35) = 100 %	
			306	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ---------- X 100% Jumlah PMI/TKI		pelatihan CPMI dilaksan akan oleh BLKLN P3MI atau BP2MI
			307	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan ---------- X 100% Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya		nihil
			308	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	Jumlah LTSA yang terbentuk ---------- X 100% Jumlah daerah kantong PMI/TKI	(1 / 7) = 14.2857 %	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	310	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	Sebanyak …..	70 Lembaga	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
	DAN PERLINDUNGAN ANAK						
			311	2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	40 Program/Kegiatan	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	313	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemKabupaten/Kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sebanyak …..	0 Media Massa	
			314	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sebanyak …..	1 Lembaga	
			315	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ---------- X 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten/Kota	(12 / 12) = 100 %	
			316	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sebanyak …..	3 Lembaga	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			317	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota)	Sebanyak …..	3 Lembaga	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	319	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	Sebanyak …..	2 Organisasi	
			320	2. Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	Sebanyak …..	2 Orang	
			321	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sebanyak …..	2 Lembaga	
			322	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak …..	2 Lembaga	
			323	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sebanyak …..	2 Kebijakan/Program	
			324	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Sebanyak …..	1 Lembaga	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			325	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ---------- X 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	(25 / 25) = 100 %	
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	327	1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada	
			328	2. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	
			329	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak	
			330	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	
			331	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	
			332	6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			333	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	
			334	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	336	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ---------- X 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	(49 / 49) = 100 %	
			337	2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee ---------- X 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	Tidak Ada Kegiatan	Tidak ada penerbitan SK Bupati tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumb

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							er dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek.
			338	3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan mksimum/absentee ---------- X 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	Tidak Ada Kegiatan	Tidak ada penerbitan SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
							Subyek
			339	4. Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ---------- ---------- x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	Tidak ada pegajuan ijin membuka tanah	Tidak ada pengajuan permohonan ijin membuka tanah
			340	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ---------- X 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	ADA (3 / 3) = 100 %	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	341				

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	342				
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	343				
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	344				
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	345				
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	347	1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air	64.96 Indeks Kualitas Pencemaran Air 60	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					(IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	Indeks Kualitas Pencemaran Udara 88.74 Indeks Tutupan Hutan/Lahan 29.49	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	349	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Ada 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah Ada 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan Tidak	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	351	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota ---------- X 100% Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi	(3 / 3) = 100 %	
			352	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PPLHD yang ada ---------- X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	(4 / 3) = 133.3333 %	
			353	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota/ kota	Jumlah MHA yang diakui ---------- X 100% Jumlah usulan MHA		Karena di Kabupaten Pacitan tidak ada Masyara

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							kat Hukum Adat
			354	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ---------- X 100% Jumlah MHA yang ada		Karena di Kabupaten Pacitan tidak Masyarakat Hukum Adat
			355	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ---------- X 100% target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat		Karena di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada diklat
			356	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	pengaduan masyarakat yang ditangani ---------- X 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	(12 / 12) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	358	1. Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ---------- X 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	(66 / 66) = 100 %	
			359	2. Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ---------- X 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan	(16 / 16) = 100 %	
			360	3. Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ---------- X 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	(30,970 / 30,970) = 100 %	
			361	4. Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun ---------- X 100% 2 (kali/ Dilaporkan Per Semester)	(2 / 2) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					
		Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran					
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal					

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	367	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sebanyak …..	147 Desa	Transformasi UPK PNPM - MD menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) dimana eks UPK PNPM - MD ada di 11 Kecamatan, kecuali Kecamatan Pacitan, dengan penetapan keputusan bersama Kepala Desa sejumlah

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							147 Desa dari 11 Kecamatan.
			368	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sebanyak …..	121 Desa	Transformasi eks PNPM - MD menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama tahun 2021 sejumlah 26 Desa dan Tahun 2022 sejumlah 121 Desa, total yang sudah melakukan

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							kerjasama antar desa sampai dengan tahun 2022 adalah 147 Desa.
			369	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sebanyak …..	55 Lembaga	Data identifikasi lembaga adat/ paguyuban seni yang ada di Kabupaten Pacitan tahun 2022.
			370	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sebanyak …..	20 Desa	Data lembaga kemasyarakatan/ lembaga adat yang melakukan

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
							kegiatan ekomnomi produktif yang mendapatkan pelatihan marketing/ pemasaran (pembuatan vidio pemasaran/ pengiklanan).
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	372	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada / Tidak Dokumen GDPK	Ada	
			373	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan	28	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.		
			374	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	36,2	
			375	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) ---------- X 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	(155,601 / 187,274) = 83.0873 %	
			376	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Sebanyak …..	11 Stakeholder	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	378	1. Persentase Fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB	(33 / 33) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			MKJP ---------- X 100% Jumlah faskes		
			379	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif ---------- X 100% Jumlah pasangan usia subur	(75,126 / 99,478) = 75.5202 %	
			380	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memilki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Sebanyak …..	4580 Kelompok Kerja KKBPK	
			381	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode konstrasepsi cara modern ---------- X 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	(1,372 / 4,440) = 30.9009 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	383	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dan Kota dengan kesertaan rendah	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki persentase Kesertaan KB paling rendah dalam Kabupaten/Kota ---------- ---- x 100% Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten/Kota	(12 / 172) = 6.9767 %	
			384	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ---------- X 100% Jumlah keluarga PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	(11,319 / 13,952) = 81.1282 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota					
			386	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia ---------- X 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	(108 / 175) = 61.7143 %	
			387	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ---------- X 100% Jumlah kendaraan wajib uji	(3,893 / 3,724) = 104.5381 %	
			388	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten/Kota, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ---------- X 100% Jumlah lintas		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					penyeberangan dalam Kabupaten/Kota		
			389	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ---------- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	(2,496 / 26,040) = 9.5853 %	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	391	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ---------- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	(2,496 / 26,040) = 9.5853 %	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	393	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses	(8 / 31) = 25.8065 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Kominfo			internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- X 100% Jumlah Perangkat Daerah		
			394	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo ---------- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	(8 / 31) = 25.8065 %	IKK Output
			395	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada / Tidak	Tidak	IKK Output
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	397	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan	(2 / 2) = 100 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 ---------- X 100% Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		
			398	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ---------- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	(40 / 40) = 100 %	IKK Output
			399	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	(12 / 31) = 38.7097 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					---------- X 100% Jumlah Perangkat Daerah		
			400	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ---------- X 100% Jumlah Layanan	(2 / 16) = 12.5 %	IKK Output
			401	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ---------- X 100% Jumlah layanan	(17 / 16) = 106.25 %	IKK Output
			402	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ---------- ---------- x 100%	(17 / 16) = 106.25 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					Jumlah sistem elektronik		
			403	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ---------- X 100% layanan publik dan layanan administrasi		IKK Output
			404	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ---------- X 100% Jumlah perangkat daerah	(12 / 31) = 38.7097 %	IKK Output
			405	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah ---------- X 100% Jumlah perangkat daerah	(12 / 31) = 38.7097 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			406	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ---------- X 100% Jumlah perangkat daerah	(31 / 31) = 100 %	IKK output
			407	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ---------- X 100% Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah	(10 / 10) = 100 %	IKK Output
			408	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ---------- X 100% Jumlah perangkat daerah	(21 / 31) = 67.7419 %	IKK Output
			409	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo ---------- X 100% Jumlah ASN pengelola	(2 / 7) = 28.5714 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					TIK		
			410	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: § Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran § Penganggaran § Strategi § Peta Jalan § Arah Kebijakan § Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	Ada	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	412	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah ---------- X 100% Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota	(133.56 / 300) = 44.5200 %	IKK Output
			413	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ---------- X 100% Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	(218.80 / 200) = 109.4 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			414	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP ---------- X 100% Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	(178.33 / 200) = 89.165 %	IKK Output
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	416	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ---------- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	(39 / 481) = 8.1081 %	
			417	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ---------- X 100% Jumlah permohonan		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		
			418	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ---------- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(180 / 520) = 34.6154 %	
			419	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ---------- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	(40 / 515) = 7.7670 %	Dari 520 koperasi yg ada, 515 merupakan koperasi usaha simpan pinjam, dan 5 sisanya merupakan jenis koperasi konsumen,produsen, jasa dan

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							pemasaran
			420	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ---------- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(32 / 520) = 6.1538 %	
			421	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ---------- X 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	(120 / 94,771) = 0.1266 %	
			422	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ---------- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(10 / 520) = 1.9231 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			423	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (tidak perlu diisi)	(3 / 520) = 0.5769 %	
			424	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ---------- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(145 / 520) = 27.8846 %	
			425	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan ---------- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(3 / 520) = 0.5769 %	
			426	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ---------- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(10 / 520) = 1.9231 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			427	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ---------- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(10 / 520) = 1.9231 %	
			428	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ---------- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(10 / 520) = 1.9231 %	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	430	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ---------- X 100% Jumlah wirausaha yang ada	(4,538 / 25,033) = 18.1281 %	
			431	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (0DS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) ---------- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			432	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra ---------- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	(260 / 25,033) = 1.0386 %	
			433	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ---------- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	(815 / 25,218) = 3.2318 %	
			434	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ---------- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	(165 / 24,868) = 0.6635 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			435	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ---------- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	(323 / 25,033) = 1.2903 %	
			436	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ---------- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	(1,215 / 25,033) = 4.8536 %	
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	438	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak serta Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor sebanyak …..	Ada Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	
			439	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Ada Perbup No. 35 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
						modal	
			440	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Sebanyak …..	1 Laporan	
			441	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Sebanyak …..	7 Kegiatan	
			442	5. Kegiatan pameran penanaman modal	Sebanyak …..	2 Kegiatan	
			443	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Sebanyak …..	4 Kegiatan	
			444	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak …..	1101 Konsultasi	
			445	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak …..	7019 Izin	
			446	9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak ….....	Laporan Realisasi Penanaman Modal Rp. 456,636,752,646	
			447	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebanyak	25 Aparatur	Pembina an aparatur penana man modal sebanya k 25

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
							Aparatur dan 15 Pendamping OSS
			448	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak	710 Perusahaan	
			449	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak	Ada Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi sebanyak 62	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	451	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Sebanyak	195 Orang	Dengan Rincian: 1. Berwirausaha KOPERI

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							NDAG: 120 orang 2. Gerakan PRAMUKA: 75 orang
			452	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Sebanyak …..	0 Orang	Pemuda yang mendapatkan bantuan kewirausahaan "NIHIL"
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	454	1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Sebanyak …..	14.114 Orang	Jumlah Pemuda yang Mendapat Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan sejumlah 14.114 orang

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			455	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Sebanyak …..	3.579 Orang	Yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan sejumlah 3.579 orang
		Peningkatan prestasi olahraga	457	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan sebanyak ..... Yang dimaksud	576 Orang	Jumlah Pelatih Olah Raga Tahun 2022

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga		sejumlah 576 Orang

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			458	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Sebanyak …..	36 Event/Kegiatan	Dengan Rincian: 1. PORPROV 2. POPDA 3. Kejurprov Angkat Besi 4. Kejurprov Paralayang 5. Kejurprov Menembak 6. Kejurprov woodball 7. Kejurprov Gulat 8. Kejurprov Bridge 9. Kejurprov Biliar 10. Kejurprov volleyball (PBVSI) 11. Kejurprov catur

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
20	STATISTIK	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	460	1. Tersedianya buku profil daerah	Tersedianya buku profil daerah	Ada	IKK Output
			461	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak …..	1 Survey	IKK Output
			462	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak …..	1 Kompilasi	IKK Output
			463	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Sebanyak …..	1 Survey	IKK Output
			464	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Sebanyak …..	1 Kompilasi	IKK Output
			465	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ---------- X 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral		IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			466	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata Indikator statistik sektoral ---------- X 100% Jumlah indikator statistik sektoral		IKK Output
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	469	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ---------- X 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan	(1 / 1) = 100 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis, Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					perencanaan		
			470	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ---------- X 100% Jumlah SE yang ada Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem	(2 / 16) = 12.5 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai		
			471	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ---------- X 100% Jumlah SE yang ada Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan		IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			472	4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan ---------- X 100% Jumlah titik pada PHKS Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup terntu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi. PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu		IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi		
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya					
			474	1.Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) sebanyak	24 Obyek	Ada 24 Situs objek pemajuan kebudayaan yang telah di inventarisasi, diselaatkan dan dipubikasikan.

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			475	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) sebanyak	24 Obyek	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan sejumlah 24 situs.
			476	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan sebanyak	17 Obyek	Objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan di kabupaten Pacitan sejumlah 17 Objek
			477	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan	0 Orang	Nihil. Tahun 2022 merupakan masa peralihan. Yang mana Kebudayaan baru

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					kapasitas tata kelola sebanyak …….		gabung dengan dinas pariwisata.
			478	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan sebanyak ….....	24 Cagar Budaya	ada 24 Cagar Budaya yang telah ditetapkan dan Tidak ada cagar budaya yang dihapus.
			479	6. Perlindungan cagar budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) sebanyak …..	17 Cagar Budaya	Terdapat 17 Cagar Budaya yang diselamatkan, diamankan/ dipelihara.

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			480	7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota sebanyak …...	0 Cagar Budaya	tidak ada cagar Budaya yang diizinkan dibawa keluar kabupat en/ kota
			481	8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) sebanyak …….	3 Cagar Budaya	ada 3 Cagar Budaya yang Dikemba ngkan oleh Provinsi.
			482	9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan sebanyak ….....	3 Cagar Budaya	Pemanfa atan cagar budaya Kabupat en Pacitan yang dimanfa atkan sejumlah 3 Cagar Budaya

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			483	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) sebanyak	1.127 Koleksi	Jumlah Koleksi Museum sejumlah 1.127 Koleksi.
			484	11a. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum sebanyak	52.961 Orang	Untuk Pengunjung Etalase Geopark Pada Tahun 2022 sejumlah 1969 . Museum Song Terus 50.992
			485	11b. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum sebanyak	6 Orang	Terdapat 6 orang yang berpartisipasi dalam pengelolaan Museum (Etalase Geopark)

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			486	12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	(tidak perlu di isi)		
			487	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Kabupaten/Kota	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya sebanyak	1 Tim	Ada 1 TIM Pendaftaran Cagar Budaya.
			488	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB sebanyak	1 Tim	Ada 1 TIM Pendaftaran Cagar Budaya
			489	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi sebanyak	0 Orang	NIHIL. Belum ada Ahli Cagar Budaya yang tersertifikasi di Kabupaten Pacitan

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			490	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah sdm Museum sebanyak	8 Orang	Jumlah SDM Cagar Budaya/ Museum di Kabupaten Pacitan: MOJENSU 5 orang, Geopark 3 orang
			491	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) sebanyak	0 Orang	NIHIL.
			492	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) sebanyak	2 Unit	Ada 2 Sarana Cagar Budaya dan Museum . 1. Etalase Geopark 2. Museum Song

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							Terus
			493	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak	10 Kegiatan	Ada10 Kegiatan museum yang melibatkan Masyarakat.
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	495	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ---------- Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	(2,577,392 Ket. A / 597,998 Ket. B) = 4.3100 Ket. D	
			496	2. Persentase ketermanfaatan perpusatakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site ---------- X 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	(35,916 / 597,998) = 6.0060 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			497	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ---------- Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	(856 Ket. A / 597,998 Ket. B) = 0.0014 Ket. D	
			498	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpusatakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ---------- X 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	(119 / 832) = 14.3029 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			499	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Sebanyak …..	3	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	501	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Sebanyak …..	0 Naskah Kuno	
			502	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Sebanyak …..	0 Naskah Kuno	
			503	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) sebanyak ..... Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	1 Budaya Etnis	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	505	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ---------- X 100% Jumlah seluruh arsip aktif Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan.Apabila masih tersimpan di	(100 / 100) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012		
			506	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ---------- X 100% Jumlah seluruh arsip inaktif Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau	(5,289 / 5,367) = 98.5467 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012		
			507	3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ---------- X 100% Jumlah seluruh arsip statis Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh	(100 / 100) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012		
			508	4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ---------- X 100% Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai	510	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada	3 Arsip	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Jumlah Arsip)		
			511	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	1 Arsip	
			512	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Jumlah Arsip)	2 Arsip	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			513	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik (Jumlah Arsip)	222 Arsip	
			514	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Jumlah Arsip)	2 Arsip	
			515	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis (Jumlah Arsip)	2 Arsip	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	517	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Sebanyak …..	3628 Rumah Tangga	3.628 RTP terdiri

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)					dari RTP Perikanan Laut dan Perikanan Umum
			518	2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional ---------- X 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota	(5 / 6) = 83.3333 %	Dari 6 TPI yang ada, Jumlah yang beroperasi 5 dikarenakan TPI Teleng Ria jadi satu dengan TPI Tamperan
			519	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Sebanyak …..	19 Izin	IUP yang diterbitkan sebanyak 19 izin

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			520	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	Sebanyak …..	86 Pembudidaya	Bimtek yang diadakan yaitu Bimtek Budidaya Lele, HPI, dan APP
			521	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun sebanyak …….	86954 Ekor	Dari 86.954 ekor produksi benih dihasilkan dari UPR dan 2 BBI, yaitu BBI Kucur dan BBI Jatigunung
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	523	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi sebanyak …….. Yang dimaksud	26 Kawasan	Kawasan Yang Dikelola PEMDA sejumlah 12, yang

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta		dikelola swasta 14 kawasan .

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			524	2.Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebanyak ..... • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	1381 Sarpras	1381 item tercatat dalam dokume n aset.
			525	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota sebanyak ……..... o Yang dimaksud dengan usaha	640 TDUP	Terdapat 640 TDUP di Kabupat en Pacitan sebagai mana

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					pariwisata meliputi bidang usaha : • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa		terlampi
			526	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Sebanyak …..	264 Orang	Tidak menghitung wisatawan perkebangsaan.

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							Yang dihitung hanya wisatawan mancanegara sejumlah 264 orang.
			527	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Sebanyak ….. (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	5 Kegiatan	Event Promosi Daerah yang telah dilakukan selama Tahun 2022 adalah: (1). YIA tanggal 23 s/d 24 Juni 2022 (2.). Festival Dewi Cemara Trenggalek 2 s/d 3 Noveber

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							2022 (3.). Direcselling Surakarta 21 s/d 23 November 2022 (4.). Direcselling Sleman, yogyakarta 8 s/d 9 Desember 2022 (5.). YIA tanggal 14 s/d 15 Desember 2022
			528	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Sebanyak ….. (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	0 Kegiatan	belum mengikuti Event luar negeri. Untuk kegiatan promosi ke luar

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							negeri kita mengandalkan promosi melalui media Elektronik seperti, instagram dan Webside.
			529	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri sebanyak ..... Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	9 Industri	Jumlah industri Pariwisata yang berpartisipasi dalam Event Promosi wisata dalam negeri sejumlah 9 industri.

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			530	8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ---------- X 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi	(21 / 22) = 95.4545 %	Dari 22 tenaga kerja dari sektor pariwisata ,yang sudah tersertivikasi sejumlah 21 orang. Dan masih ada 1 orang yang belum lolos kriteria mungkin karena SDMnya belum memenuhi persyaratan.

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			531	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ---------- X 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	(638 / 500) = 127.6000 %	Dari sasaran awal yg tadinya 500 orang, Pada Tahun 2023 ini yang mendapaytkan Pembekalan sejumlah 638 orang.
			532	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Sebanyak …..	7 Lokasi	Terdapat 7 lokasi yang memperileh pemberdayaan Masyarakat dan pembinaan kemitraaan usaha masyarakat.

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota					
		Tingkat Hunian Akomodasi					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD					
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	538	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan sebanyak ….....	264 Unit	
			539	2. Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan sebanyak ……...	129 Unit	
			540	3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebanyak …….....	9 Dokumen	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			541	4. Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ---------- X 100% Jumlah prasarana yang dibangun	(129 / 129) = 100 %	
			542	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah usulan yang difasitasi ---------- X 100% Jumlah usulan usaha pertanian	(9 / 9) = 100 %	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	544	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ---------- X 100% Luas area terkena bencana Bencana yang dimaksud adalah becana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	(11 / 12) = 91.6667 %	
28	KEHUTANAN	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	545	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			546	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi sebanyak …….	Kelompok Masyarakat	
			547	3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi ……ha	Ha	
			548	4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Kejadian	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	550	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota sebanyak …...	Tidak Nihil	
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	552	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja ---------- X 100% Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudh lengkap dan benar	(1 / 1) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			553	--	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja ---------- X 100% Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudh lengkap dan benar	(1 / 1) = 100 %	
			554	2. Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja ---------- X 100% Jumlah permohonan penerbitan TDG	(8 / 8) = 100 %	
			555	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG ---------- X 100% Jumlah gudang yang ada di Kabupaten/Kota	(8 / 117) = 6.8376 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			556	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ---------- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri		Di Aplikasi OSS belum ada penerbitan STPW
			557	--	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ---------- X 100% Jumlah permohonan		Di Aplikasi OSS belum ada penerbitan STPW

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri		
			558	--	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri : Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ---------- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri		Di Aplikasi OSS belum ada penerbitan STPW
			559	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	(3 / 3) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					---------- X 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer		
			560	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) ---------- X 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar		Untuk Surat Keterangan Asal (SKA) bukan kewenangan dinas perdagangan dan tenaga kerja melainkan kewenangan Kementrian Perdagangan

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			561	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	100 %	
			562	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	9 %	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	564	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	X = a/(bxc) x 100 X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang	0,000038225210738983 9 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
					disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	566	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ---------- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota	(557 / 2,005) = 27.7805 %	
			567	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ---------- X 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		pada tahun anggaran 2022 tidak ada alokasi anggaran kegiatan pengawasan BDKT

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
31	PERINDUSTRIA N	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	569	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		Tidak terdapat kawasan industri
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk	571	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik	50 % a. Tersusunnya naskah akademik (30%) Ya b. Tersusunnya Draft	Belum memiliki RPIK

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)			(30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	Raperda RPIK (20%) Ya c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) Tidak d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) Tidak e. Penetapan Perda RPIK (10%) Tidak	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	573	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		Tidak ada yang mengaju kan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan					

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	577				

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		-- 7 Informasi industri secara lengkap dan terkini --	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Tidak 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Tidak 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada 5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Tidak 6. Informasi tenaga kerja (10% Tidak 7. Informasi Investasi (10%) Tidak	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			578	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan periusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas ---------- X 100% Total Populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	(23 / 11,791) = 0.1951 %	
32	TRANSMIGRASI	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	579	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	NIHIL Kawasan	Karene Pacitan bukan daerah tujuan transmig rasi

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETER ANGAN
			580	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak ….. (Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)	NIHIL Permukiman	Karene Pacitan bukan daerah tujuan transmig rasi
			581	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah satuan pemukiman yang dibina sebanyak ….....	NIHIL Permukiman	Karene Pacitan bukan daerah tujuan transmig rasi

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2022 bedasarkan dengan Indikator Kinerja Kunci Hasil setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian kinerja kunci hasil setiap urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Derah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ---------- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(9,905 / 13,114) = 75.5300 %	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ---------- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang	(34,980 / 45,554) = 76.7880 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					bersangkutan		
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ---------- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(18,810 / 22,166) = 84.8597 %	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(386 / 91,411) = 0.4223 %	
2	KESEHATAN	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ---------- x 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	(298 / 597,998) = 0.0498 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ---------- x 100% Jumlah RS di Kabupaten/Kota	(2 / 3) = 66.6667 %	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ---------- x 100% Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota	(5,931 / 6,754) = 87.8146 %	
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ---------- x 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota	(5,471 / 6,447) = 84.8612 %	
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah bayi baru lahir yang mendaatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota	(5,330 / 6,140) = 86.8078 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah balita di Kabupaten/Kota	(29,460 / 31,737) = 92.8254 %	
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota	(58,320 / 61,297) = 95.1433 %	
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota	(240,258 / 336,619) = 71.3739 %	
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga Negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah warga Negara usia	(120,998 / 126,530) = 95.6279 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota		
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota	(94,432 / 170,908) = 55.2531 %	
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	(8,212 / 7,635) = 107.5573 %	
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	(1,197 / 1,134) = 105.5556 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota	(6,050 / 5,217) = 115.9670 %	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ---------- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	(7,995 / 6,835) = 116.9715 %	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ---------- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	(1,136.98 / 1,439.22) = 78.9997 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ---------- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)		Tidak ada data yang terkait itu
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ---------- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota	(5,092 / 8,274) = 61.5422 %	
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	(112,678 / 147,277) = 76.5075 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota		dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ---------- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut		
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ---------- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	(142,136 / 147,277) = 96.5093 %	
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ---------- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	(42 / 42) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap ---------- x 100% Jumlah Panjang jalan Kabupaten/Kota	(800,345 / 1,374) = 58,249.2722 %	
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis ---------- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota	(48 / 48) = 100 %	
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ---------- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	(607 / 607) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PERUMAHAN RAKYAT	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022 ---------- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022	(9 / 9) = 100 %	
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rumah Tangga penerima fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ---------- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	(0.01 / 0.01) = 100 %	Tahun 2022 tidak ada masyarakat yang terdampak kegiatan relokasi program pemerintah daerah

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ---------- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	(12.8 / 284.8) = 4.4944 %	
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah tidak layak huni ---------- x 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	(17.272 / 165.591) = 10.4305 %	
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100% Jumlah Perumahan Kabupaten/Kota	(5 / 5) = 100 %	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pengaduan yang ditangani ---------- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	(220 / 220) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	(40 / 40) = 100 %	
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ---------- x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	(598,934 / 598,934) = 100 %	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ---------- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	(598,934 / 598,934) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ---------- x 100 % Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	(948 / 1,057) = 89.6878 %	
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ---------- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	(12 / 12) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	15 Menit	
6	SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ---------- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	(1,334 / 1,334) = 100 %	
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ---------- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat	(350 / 350) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota		
7	TENAGA KERJA	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ---------- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	(3 / 3) = 100 %	
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja yang memilki sertifikat kompetensi ---------- x 100% Jumlah tenaga keseluruhan	(149 / 361,268) = 0.0412 %	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ---------- Jumlah tenaga kerja	(11,107,402 Ket. A / 361,268 Ket. B) = 30.7456 Ket. D	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100% Jumlah perusahaan	(30 / 73) = 41.0959 %	
		46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---------- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	(754 / 1,048) = 71.9466 %	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD ---------- x 100% Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	(12,985,891,870 / 470,517,588,839) = 2.7599 %	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ---------- x 100% Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	(12 / 140,020) = 0.0086 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					(Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ---------- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	(13 Orang / 293,945 Orang) x 100,000 Rasio = 4.4226	
9	PANGAN	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ---------- x 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	(9.094 / 100) = 9.094 %	
10	PERTANAHAN	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ---------- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	(38,307,272 / 51,123,620) = 74.9307 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ---------- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ADA (3 / 4) = 75 %	
		53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ---------- x 100% Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	(38,307,272.5 / 51,123,620.78) = 74.9307 %	
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha; ---------- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	Tidak ada kegiatan	Tidak ada tanah obyek landreform

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ---------- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	Tidak ada pengajuan ijin membuka tanah	Tidak ada pengajuan permohonan ijin membuka tanah
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ---------- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	Tidak ada pengajuan permasalahan sengketa	Tidak ada pengajuan penyelesaian sengketa pertanahan
11	LINGKUNGAN HIDUP	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	IKLH Kabupaten/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).	64.96 Indeks Kualitas Pencemaran Air 60 Indeks Kualitas Pencemaran Udara 88.74 Indeks Tutupan Hutan/Lahan 29.49	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Total Volume sampah yang dapat ditangani ---------- x 100% Jumlah seluruh Total Volume Timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota	(16,451.79 / 16,793.89) = 97.9629 %	
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ---------- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60	Perekaman KTP Elektronik	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman ---------- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP-el	(481,350 / 482,260) = 99.8113 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ---------- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	(54,207 / 116,674) = 46.4602 %	
		62	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ---------- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	(125,462 / 127,484) = 98.4139 %	
		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ---------- x 100% Jumlah PD	(5 / 27) = 18.5185 %	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100% Jumlah Desa Tertinggal (per-awal tahun 2022)	(1 / 1) = 100 %	Sejak Tahun 2020 di Kabupaten Sudah tidak terdapat Desa dengan status Desa Tertinggal

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun 2022)	(19 / 76) = 25 %	Urutan Status Desa Menurut IDM adalah Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Status Desa yang memenuhi kriteria Desa Mandiri yang mungkin adalah Desa dengan status Maju. Desa Maju awal tahun 2022 diambil dari data tahun 2021 karena SK penetapan status desa terbit di bulan Juni.
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	TFR (Angka Kelahiran Total) 5∑ASFR	1,98	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah peserta KB Aktif Modern ---------- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	(75,126 / 99,478) = 75.5202 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		68	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ---------- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	(10,877 / 99,478) = 10.9341 %	
15	PERHUBUNGAN	69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan) o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani	0,7	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wialyah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan		

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 70, bobot angkutan jalan =30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30 (bobot angkutan jalan=70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan= 100) Bobot trayek atau lintas: a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot= 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-		

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					4 dalam seminggu), bobot=0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot=0.5		
		70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,26	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- x 100% Jumlah PD	(14 / 31) = 45.1613 %	IKK Outcome
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ---------- x 100% Jumlah Layanan Publik	(4 / 8) = 50 %	IKK Outcome

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ---------- x 100% Jumlah Penduduk	(298,835 / 368,795) = 81.0301 %	IKK Outcome
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	(201 / 520) = 38.6538 %	
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ---------- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	(4,538 / 25,033) = 18.1281 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
18	PENANAMAN MODAL	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(Jumlah Investasi tahun 2022 - jumlah Investasi tahun 2021) di Kabupaten/Kota ---------- x 100% Jumlah Investasi tahun 2021 di Kabupaten/Kota	(993,058,623,474 - 671,214,382,934) / 671,214,382,934 = 47.9495 %	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota ---------- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	(2,880 / 84,428) = 3.4112 %	Jumlah Pemuda yang berwirausahaan dari 12 Kecamatan sejumlah 2.880 orang
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota ---------- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	(32,960 / 84,428) = 39.0392 %	Jumlah Pemuda yang Menjadi Anggota Aktif Organisasi Tahun 2022 sejumlah 32.960 orang

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		79	Peningkatan prestasi olahraga	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	96 Medali/Penghargaan	Dengan Rincian: Medali Emas sejumlah 45 medali Medali Perak 22 Medali, Medali Perunggu 29 Medali
20	STATISTIK	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah PD	(31 / 31) = 100 %	IKK Outcome
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah PD	(31 / 31) = 100 %	IKK Outcome
21	PERSANDIAN	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100% Jumlah area penilaian		IKK Outcome

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
22	KEBUDAYAAN	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ---------- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	(17 / 24) = 70.8333 %	Cagar Budaya yang dilestarikan sejumlah 17 CB dari yang terdata 24 CB.
23	PERPUSTAKAAN	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	57,5	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan	64,438	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan		
24	KEARSIPAN	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	T= (a+i+s+j)/4 T = tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip I = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN	(100 + 98.546 + 100 +) / 4 = 74.6365	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	T = (m+b+g+a+c+i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelematan arsip dari	100=(100+100+100+100+100+100)/6	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					bencana dengan NSPK g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah preovinsi yang digabung dan/atau dibuabrkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota ---------- x 100 % Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	(10,521.53 / 13,596) = 77.3870 %	Produksi perikanan tangkap sebesar 8.874,35 ton Produksi perikanan budidaya sebesar 1.647,18 ton

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
26	PARIWISATA	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah wisatawan tahun 2022 - Jumlah wisatawan tahun 2021 ---------- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2021	(1,566,186 - 834,419) / 834,419 = 87.6978 %	Jumlah wisatawan Pada Tahun 2021 sejumlah 834.419 orang dan pada tahun 2022 sejumlah 1566.186 orang.
27	PERTANIAN	90	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton) ---------- x 100% Luas panen (ha)	(439,215 / 60,423) = 726.9004 %	
		91	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kejadian penyakit/kasus Tahun 2022 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2021 ---------- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun 2021	(3,335 - 2,783) / 2,783 = 19.8347 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		92		1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ---------- X 100% Luas area terkena bencana Bencana yang dimaksud adalah becana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	(11 / 12) = 91.6667 %	
28	KEHUTANAN	93	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan		
		94		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi sebanyak …….	Kelompok Masyarakat	
		95		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi ……ha	Ha	
		96		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Kejadian	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memilki ijin ---------- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	tidak	
31	PERINDUSTRIAN	98	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022 - Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021) ---------- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021	(11,923 - 11,719) / 11,791 = 1.7301 %	
		99	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK ---------- x 100% Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIP Definisi Operasional : Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam		Belum memiliki RPIK

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Keterangan : ▪Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutkan akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan		

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun ▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. ▪ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun		

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.		
		100	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	(16 / 16) = 100 %	
		101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		Izin perluasan industri tidak ada
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	(16 / 16) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota				
		103	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-- 7 Informasi industri secara lengkap dan terkini --	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Tidak 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Tidak 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada 5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Tidak 6. Informasi tenaga kerja (10% Tidak 7. Informasi Investasi (10%) Tidak	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
32	TRANSMIGRASI	104	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	NIHIL Kawasan	Karene Pacitan bukan daerah tujuan transmigrasi

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Penunjang

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2022 bedasarkan dengan Indikator Kinerja Kunci Penunjang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian kinerja kunci penunjang urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh Perangkat Derah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Table 2.4

Indikator Kinerja Kunci Penunjang

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	PERENCANAAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ---------- x 100% Jumlah APBD	(520,714,080,018.2 / 1,663,713,823,139.37) = 31.2983 %	-
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD ---------- X 100% Jumlah Pendapatan pada APBD	(166,703,135,564.69 / 1,657,537,661,332.69) = 10.0573 %	-

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Ada Level 3	Berdasarkan hasil penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kab. Pacitan memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,194 dan skor Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar 2,88 dan skor IEPK 2,69. Dari hasil tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain : 1. Jabaran (cascading) kinerja masih belum menunjukkan hubungan kausalitas (pohon kinerja) dengan kinerja level di atasnya dan belum berorientasi hasil; 2. Penetapan indikator kinerja sasaran pemda, sasaran OPD, program, ataupun kegiatan belum didukung dengan pertimbangan yang terukur; 3. Belum melakukan penilaian resiko baik level

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						strategis pemda, OPD, ataupun operasional OPD secara periodik; 4. Belum tersedia sumberdaya yang memadai untuk implementasi manajemen resiko; 5. Sebagian besar pegawai belum memiliki pemahaman yang memadai tentang manajemen resiko; 6. Belum dilakukan penilaian resiko terhadap kemungkinan terjadinya fraud.

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Ada Level 2	BPKP Perwakilan Prov. jatim telah melakukan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat kab. Pacitan. Hasil dari evaluasi atas penilaian tersebut, Inspektorat berada pada level 2 (Structured) dengan skor 2,33. Dari hasil evaluasi tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Perencanaan SDM 2. Pengembangan SDM 3. Perencanaan dan Pengawasan 4. Program penjaminan dan peningkatan Kualitas 5. Mekanisme pendanaan 6. Audit ketaatan 7. Audit kinerja 8. Assurance atas GRC Organisasi 9. Jasa konsultansi
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures ---------- x 100% Jumlah belanja APBD	(1,663,713,823,139.37 - 271,564,342,253) / 1,663,713,823,139.37 = 83.6772 %	-

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun Terakhir : 9 WTP 1. Opini BPK Tahun 2021 : WTP 2. Opini BPK Tahun 2020 : WTP 3. Opini BPK Tahun 2019 : WTP 4. Opini BPK Tahun 2018 : WTP 5. Opini BPK Tahun 2017 : WTP 6. Opini BPK Tahun 2016 : WTP 7. Opini BPK Tahun 2015 : WTP 8. Opini BPK Tahun 2014 : WTP 9. Opini BPK Tahun 2013 : WTP 10. Opini BPK Tahun 2012 : WDP	-
2	PENGADAAN	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022 ---------- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022		Tidak ada kontrak infrastruktur ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022
		8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ---------- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	(117 / 1,620) = 7.2222 %	

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan ---------- X 100% total belanja operasional dan modal	(226,131,136,072 / 249,601,198,461) = 90.5970 %	
		10	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) ---------- X 100% Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	(399,377,386,720 - 389,729,000,000) / 389,729,000,000 = 2.4757 %	Kendala : Data realisasi PDN Tahun 2021(n-1) diambil dari PMEP, karena aplikasi siswas P3DN baru diberlakukan pada tahun 2022
3	KEPEGAWAIAN	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ---------- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(785 / 1,457) = 53.8778 %	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dibandingkan Jumlah seluruh Pegawai Pemerintah diluar tenaga kesehatan dan guru

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		12	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(380 / 1,457) = 26.0810 %	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibandingkan dengan Jumlah seluruh pegawai pemerintah non tenaga kesehatan dan guru
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(380 / 380) = 100 %	Seluruh jabatan fungsional kecuali non tenaga kesehatan dan guru sudah ditetapkan dalam jabatan fungsional sesuai jenjangnya
4	MANAJEMEN KEUANGAN	14	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	Realisasi Belanja Nilai absolut dari {---------- - 1} X 100% Total Belanja APBD (sebelum perubahan)	(1,663,713,823,139.37 / 1,669,887,240,944) - 1 = -0.3697 %	
		15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	Total PAD dalam realisasi Nilai absolut dari {---------- - 1} X 100% Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)	(1,657,537,661,332.69 / 1,654,383,640,944) - 1 = 0.1906 %	

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		16	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4 Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya	
		17	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA ---------- x 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya	(175,227,284,712.49 / 1,610,281,291,593.25) = 10.8818 %	
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya) ---------- x 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya)	(1,809,855,387,663 / 1,663,713,823,139.37) = 108.7841 %	

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ---------- x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci (11 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD	(6 / 11) = 54.5455 %	

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan

Laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan merupakan wujud komitmen Bupati selaku pengemban Amanah masyarakat dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 sesuai Perda Kabupaten Pacitan No 10 Tahun 2021 memuat visi" Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia" dengan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Dengan Tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagi berikut:

A. Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capainkinerjanya, dengan rumus: Persentase Capaian kinerja = Realisasi X 100 % Target
B. Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus: Persentase Capaian kinerja = Target – (Realisasi- Target) X 100 %

Target Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.5

Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja bertujuan:

a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemeberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah;
e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Berikut merupakan perjanjian kinerja Bupati Pacitan yang menggambarkan kinerja yang akan dicapai Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.6

Target Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Misi 1: Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksessibilitas	Indeks Infrastruktur	68
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,26

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Lingkungan		
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa			
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,63
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,805
3.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.615.099
4.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	85,93
5.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	72,5
6.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,32
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya			
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	-3,4
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	34.549.315
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.773.911.349
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.187.799.547
		PDRB Industri Pengolahan	804.425.160
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,1
4.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	8
Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani			
1.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,85
		Nilai IKM	83,68
2	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	77
3	Terwujudnya Birokrasi Yang	Nilai SAKIP	75

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Akuntabel dan Transparan	Opini BPK	WTP
		Maturitas SPIP	3
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	36,69

Untuk mencapai beberapa target indikator kinerja sebagamana disebutkan diatas maka didukung dengan anggaran yang melekat pada Program-prgoram Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Anggaran Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	894.401.594.577	930.446.212.028
2	Program Pengelolaan Pendidikan	128.142.215.000	132.621.889.801
3	Program Pengembangan Kurikulum	40,000,000	40.000.000
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	10,862,600,000	10.187.940.000
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	40,000,000	26.840.000
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,130,652,511	113.888.758.636
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	13,468,496,065	11.931.135.832
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	289,340,000	277.745.000
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,527,881,950	1.825.421.168
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	4,369,177,121	6.453.939.621
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8,027,899,000	9.546.719.965
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	602,000,000	698.800.000
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,874,261,500	4.858.009.500

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1,006,950,589	1.634.343.010
15	Program Penataan Bangunan Gedung	1,235,525,340	3.547.250.040
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	640,000,000	631.220.000
17	Program Penyelenggaraan Jalan	50,670,493,059	85.918.478.393
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	152,047,300	149.102.600
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	825,000,000	825.000.000
20	Program Pengembangan Perumahan	259,556,000	320.426.000
21	Program Kawasan Permukiman	1,829,950,000	2.498.851.000
22	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	252,510,000	281.069.000
23	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	28,867,700,000	45.045.685.000
24	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2,015,000,000	5.288.596.573
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	633,668,000	693.668.000
26	Program Penanggulangan Bencana	917,790,000	1.102.790.000
27	Program Pemberdayaan Sosial	277,415,000	273.458.845
28	Program Rehabilitasi Sosial	412,280,000	447.573.900
29	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,750,000,000	8.038.878.600
30	Program Penanganan Bencana	152,790,000	243.824.700
31	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	25,000,000	85.000.000
32	Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	2.501.000
33	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,252,601,500	2.141.676.148
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	25,000,000	1.237.500.000
35	Program Hubungan Industrial	50,000,000	50.000.000
36	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	138,305,000	263.305.000
37	Program Perlindungan Perempuan	90,000,000	90.000.000
38	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	38,000,000	38.000.000
39	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	5,000,000	12.000.000
40	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	20,000,000	32.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
41	Program Perlindungan Khusus Anak	41,592,100	49.592.100
42	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	13,000,000	13.000.000
43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	728,000,000	960.500.000
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	18,000,000	40.000.000
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	41,000,000	41.000.000
46	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100,000,000	100.000.000
47	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	7,600,000,000	2.929.048.208
48	Program Penatagunaan Tanah	447,400,000	647.400.000
49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	77,182,000	327.182.000
50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	213,550,000	253.550.000
51	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,126,006,500	1.472.296.500
52	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	13,000,000	13.000.000
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	78,900,000	78.900.000
54	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	39,872,500	39.872.500
55	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	58,625,000	58.625.000
56	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15,000,000	15.000.000
57	Program Pengelolaan Persampahan	6,840,634,000	7.267.544.000
58	Program Pendaftaran Penduduk	-	15.859.373
59	Program Pencatatan Sipil	85,382,000	85.382.000
60	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144,490,400	144.490.400

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
61	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	39,909,600	39.909.600
62	Program Penataan Desa	30,000,000	50.000.000
63	Program Peningkatan Kerjasama Desa	103,500,000	173.645.000
64	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2,767,047,832	4.018.357.135
65	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	623,500,000	823.500.000
66	Program Pengendalian Penduduk	159,990,000	179.990.000
67	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6,345,080,050	6.346.840.050
68	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2,507,307,700	2.657.307.700
69	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3,831,802,200	3.948.498.000
70	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	716,130,000	1.179.419.420
71	Program Aplikasi Informatika	1,112,056,000	1.400.746.000
72	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50,000,000	43.000.000
73	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	70,000,000	463.000.000
74	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	73,000,000	68.800.000
75	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	404,200,000	404.200.000
76	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	86,500,000	136.500.000
77	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	3,654,284,000	3.802.644.000
78	Program Pengembangan Umkm	235,500,000	235.500.000
79	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40,000,000	40.000.000
80	Program Promosi Penanaman Modal	95,620,400	95.620.400
81	Program Pelayanan Penanaman Modal	215,520,000	210.860.000
82	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	399,962,000	385.492.000
83	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	89,480,000	89.480.000

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
84	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	500,000,000	612.200.000
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,075,000,000	3.465.000.000
86	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350,000,000	375.000.000
87	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	82,500,000	272.500.000
88	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	10,544,000	10.340.000
89	Program Pengembangan Kebudayaan	300,000,000	300.000.000
90	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	1.175.000.000
91	Program Pembinaan Sejarah	100,000,000	250.000.000
92	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50,000,000	35.000.000
93	Program Pengelolaan Permuseuman	-	15.000.000
94	Program Pembinaan Perpustakaan	800,614,000	865.584.000
95	Program Pengelolaan Arsip	318,380,000	332.310.000
96	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	50,620,000	89.190.000
97	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	509,878,000	686.895.000
98	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	376,965,000	710.465.000
99	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	246,440,000	591.670.000
100	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	15,817,192,000	16.302.192.000
101	Program Pemasaran Pariwisata	169,000,000	711.808.100
102	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2,342,938,000	2.495.129.900
103	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3,935,445,000	4.824.278.900
104	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,885,000,000	3.931.150.000
105	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	150,000,000	1.575.912.000
106	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	303,000,000	5.316.742.222

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
107	Program Perizinan Usaha Pertanian	0	25.000.000
108	Program Penyuluhan Pertanian	535,200,000	789.775.000
109	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	-	1.000.000
110	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,259,800,000	2.151.579.340
111	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	65,000,000	82.500.000
112	Program Pengembangan Ekspor	-	4.002.000
113	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	64,848,000	99.848.000
114	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	150,000,000	150.000.000
115	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	272,000,000	767.230.000
116	Rogram Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	19.000.000
117	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	25,000,000	55.000.000
118	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5,366,358,508	5.300.358.508
119	Program Perekonomian Dan Pembangunan	10,730,291,935	3.278.384.585
120	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	14,644,107,223	16.051.333.862
121	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	844,410,100	1.291.342.440
122	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,500,000,000	1.775.223.104
123	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	276,599,485,300	284.470.694.088
124	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	530,000,000	670.000.000
125	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,193,940,000	2.448.940.000
126	Program Kepegawaian Daerah	1,589,968,650	1.723.176.010
127	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,611,462,850	2.021.462.850
128	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	400,000,000	484.140.000

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
129	Program Penyelenggaraan Pengawasan	904,621,800	853.600.000
130	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	424,286,500	537.694.100
131	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	937,216,750	997.561.510
132	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6,133,890,100	8.259.954.600
133	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	704,191,856	882.863.398
134	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	444,580,200	472.895.100
135	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	945,414,400	978.333.300
136	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	142,441,800	142.441.800
137	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	160,000,000	317.350.000
138	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,065,000,000	1.070.170.000
139	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	106,346,200	256.696.200
140	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	695,000,000	1.229.310.000
		1,654,069,101,966	**1.809.643.387.663**

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel. 2.8

Target Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
Misi 1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup						
Tujuan 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil						
Indikator Tujuan		**: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**74**	**87,3**	**117,97**	**Sangat berhasil**
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksessibilitas	Indeks Infrastruktur	68	73,99	108,81	Sangat berhasil
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,26	64,96	104,34	Sangat berhasil
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa						
Tujuan 2 Mengingkatkan saya saing sumberdaya manusia yang berbudaya dan Bahagia						
Indikator Tujuan		**Indeks Pembangunan Manusia**	**69,93**	**69,37**	**99,2**	**berhasil**
3.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan	Indeks Pendidikan	0,63	0,612	97,14	berhasil

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	Dasar Pendidikan					
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,805	0,807	100,25	Sangat behasil
5.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.615.099	9.184.000	95,52	Berhasil
6.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	85,93	85,09	99,02	Berhasil
7.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	72,5	79,6	109,79	Sangat behasil
Tujuan 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan						
Indikator Tujuan		**Angka Kemiskinan**	**13,53**	**13,8**	**98**	**Berhasil**
8.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,32	0,338	97,35	Berhasil
Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya						
Tujuan 4 Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan						
Indikator		**% pertumbuhan ekonomi**	**5,24**	**5,54**	**105,72**	**Sangat berhasil**
9.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	-3,4	-0,21	319	Sangat berhasil
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	34.549.315	30.340.000	87,82	Cukup

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
10.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.773.911.349	2.820.635.400	101,68	Sangat berhasil
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.187.799.547	2 169 782.800	99,18	Berhasil
		PDRB Industri Pengolahan	804.425.160	825 851.900	102,66	Berhasil
11.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,1	1,74	56,13	Kurang
12.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	8	7,41	107,96	Berhasil
Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani						
Tujuan 5		**Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan responsive**				
Indikator		**: Indeks Reformasi Birokrasi**	**68,5**	**69,08**	**100,85**	**Sangat berhasil**
13.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,85	2,34	126,49	Sangat berhasil
		Nilai IKM	83,68	82,63	98,75	Berhasil
14	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	77	52,47	68,14	Kurang
15.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	75	68,44	91,25	Berhasil
		Opini BPK	WTP	WTP		Berhasil
		Maturitas SPIP	3	3	100	Berhasil
16.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	36,69	37,1	101,12	Berhasil

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator tujuan ada 3 (tiga) indikator telah tercapai dengan katagori Sangat Berhasil dengan nilai capaian lebih dari 100%, 2 (dua) indikator telah tercapai dengan kategori Berhasil dengan nilai capaian 90-100%. Adapun dari 16 sasaran terdapat 22 (dua puluh dua) indikator sasaran, ada 7 (tujuh) indikator Sangat Berhasil, 11 (sebelas) Berhasil, 1 (satu) cukup, dan 2 (dua) Kurang. Dilihat dari capaian tersebut masih terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang pencapaiaannya masih kurang yaitu indikator Indeks Daya Saing Pariwisata dan Indeks Profesionalitas Aparatur.

Indeks Daya Saing Pariwisata tercapai 56,13% dibandingkan dengan target Tahun 2022. Dari 8 (delapan) sub indicator indeks daya saing pariwisata, sub indicator environment indicator berada dalam tahap yang belum normal belum berkembang sehingga pembangunan pariwisata harus diimbangi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan serta perlunya upaya untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai. Meskipun jumlah kunjungan wisata meningkat 187,70% bila dibandingkan tahun sebelumnya namun masih diperlukan Langkah-langkah untuk meningkatkan indeks pariwisata antara lain: perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan menyediakan fasilitas umum yang memadai, kemudahan akses transportasi, peningkatan pemasaran melalui media sosial, meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, peningkatan industri yang mendukung pariwisata, meningkatkan program dan anggaran yang mendukung pariwisata dari berbagai sektor, pembangunan teknologi digital pada bidang pariwisata dan infrastruktur pendukung.

Indeks Profesionalitas Aparatur Kabupaten Pacitan tercapai 68,14% dari target yang ditetapkan Tahun 2022. Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam menjalankan tugas fungsi dengan jabatannya. Nilai Indeks profesionalitas ASN Kabupaten Pacitan sebesar 52,47 merupakan kategori tingkat profesionalitas sangat rendah terdiri dari: kualifikasi pendidikan12,58, kompetensi 11,67, kinerja 23,33 dan disiplin 4,98. Apabila dilihat dari standar maksimal kualifikasi Pendidikan 30, kompetensi 40, kinerja 30 dan disiplin 5, maka nilai yang masih rendah ada pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Diharapkan nilai tersebut dapat ditingkatkan dengan peningkatan tingkat Pendidikan, pengembangan kompetensi melalui diklat kepemimpinan, fungsional,diklat teknis, workshop/seminar dan peningkatan kinerja.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.9

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2021	2022	
Misi 1: Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup					
Tujuan 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil					
Indikator Tujuan :		**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**N/A**	**87,3**	
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksessibilitas	Indeks Infrastruktur	N/A	73,99	
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,68	64,96	- 9,38%
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa					
Tujuan 2 Mengingkatkan saya saing sumberdaya manusia yang berbudaya dan bahagia					
Indikator Tujuan		**Indeks Pembangunan Manusia**	**68,57**	**69,37**	**1,17**
3.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,605	0,612	1,16
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8	0,807	0,88

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2021	2022	
5.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	8.887.000	9.184.000	3,34
6.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	84,87	85,09	0,26
7.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	N/A	79,6	
Tujuan 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan					
Indikator Tujuan :		**Angka Kemiskinan**	**15,11**	**13,8**	-8,67
8.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,337	0,338	-0,662
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya					
Tujuan 4 Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan					
Indikator		**% pertumbuhan ekonomi**	**2,49**	**5,54**	122,49
9.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	25,66	-0,21	-100,82
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	27.810.000	30.340.000	109,10
10.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.700.669.700	2.820.635.400	4,44
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.056.364.000	2.169.782.800	5,52

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2021	2022	
		PDRB Industri Pengolahan	773.285.400	825 851.900	6,8
11.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	0,5	1,74	348
12.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	15,97	7,41	46,4
Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani					
Tujuan 5		**Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan responsive**			
Indikator		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**68,31**	**69,08**	**1,13**
13	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,41	2,34	65,96
		Nilai IKM	83,24	82,63	-0,73
14	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	50,18	52,47	4,56
15	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	69,19	68,44	-1,08
		Opini BPK	WTP	WTP	100
		Maturitas SPIP	3	3	100
16	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	6,45	37,1	475,19

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 secara keseluruhan rata-rata meningkat. Terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Gini, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP. Penurunan capaian IKLH sebesar 9,38% dikarenakan adanya perbedaan perhitungan antara Tahun 2021 dan Tahun 2022. Tahun 2021 berdasarkan jumlah luasan sedangkan Tahun 2022 berdasarkan data spasial. Penurunan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0,73% namun masih dalam kategori Baik. Penurunan Nilai SAKIP sebesar 1,08% dengan rekomendasi masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Pencapaian indeks gini Kabupaten Pacitan Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,001 poin atau 0,662% yang menandakan adanya kenaikan ketimpangan pendapatan masyarakat. Angka capaian pada tahun 2022 tergolong pada kategori moderat

Terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian cukup tinggi yaitu Indeks Daya Saing Pariwisata dan Prosentase Kemandirian Desa. Indeks daya saing pariwisata meningkat cukup tinggi dikarenakan jumlah kunjungan wisata meningkat 187,70% dibandingkan tahun lalu. Meskipun capaian masih dibawah capaian pada masa pandemic covid-19 namun sudah ada pergerakan di sektor pariwisata. Masyarakat mulai tertarik untuk mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Pacitan. Prosentase Kemandirian Desa meningkat dikarenakan adanya penambahan desa mandiri pada tahun 2022 menjadi 23 desa. Desa tersebut merupakan desa dengan ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.10

Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
Misi 1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup						
Tujuan 1		**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil**				
Indikator Tujuan		**: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**82**	**87,3**	**6,46**	**Lebih tinggi**
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian & Aksessibilitas	Indeks Infrastruktur	72	73,99	2,76	Lebih tinggi
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,26	64,96	-0,46	
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa						
	Tujuan 2	**Mengingkatkan saya saing sumberdaya manusia yang berbudaya dan bahagia**				
	Indikator Tujuan	**: Indeks Pembangunan Manusia**	**72,66**	**69,37**	**-4,53**	
1.	Meningkatny	Indeks Pendidikan	0,67	0,612	-8,66	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
	a Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan					
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,818	0,807	-1,34	
3.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	10.691.329	9.184.000	-14,1	
4.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	87,11	85,09	-2,32	
5	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	73,5	79,6	108,3	Lebih tinggi
	Tujuan 3	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan**				
	Indikator Tujuan	**Angka Kemiskinan**	**12,22**	**13,8**	12,93	Nilai harus diturunkan untuk mendapatkan capaian yang baik
6	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,25	0,338	35,2	Nilai harus diturunkan untuk mendapatkan capaian yang baik

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya						
	Tujuan 4	**Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan**				
	Indikator	**% pertumbuhan ekonomi**	**5,25**	**5,54**	**5,52**	**Lebih tinggi**
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	2,82	-0,21	-107,45	
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	42.171.572	30.340.000		
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.909.003.882	2.820.635.400	-3,04	
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.522.976.616	2 169 782.800	-14	
		PDRB Industri Pengolahan	900.239.686	825 851.900	-8,26	
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,5	1,74	-53,14	
4.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,6	7,41	97,5	
Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani						
Tujuan 5		**Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan responsive**				
Indikator		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**70,5**	69,08	-2,01	
1.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	2,5	2,34	-6,4	
		Nilai IKM	86,08	82,63	-4,01	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
2	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	81	52,47	-35,22	
3	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	84	68,44	-18,52	
		Opini BPK	WTP	WTP	0	
		Maturitas SPIP	3	3	0	
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	46,15	37,1	-19,61	

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, oleh sebab itu semua target kinerja Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD seharusnya tidak ada yang melampaui, namun sebagaimana tabel diatas pada indikator tujuan terhadap 2 (dua) indikator yaitu IKLI dan pertumbuhan ekonomi. Pada indikator sasaran ada 2 (dua) indikator pada tahun 2022 capaiannya sudah melampaui (+) target RPJMD Tahun 2026 yaitu indeks infrastruktur dan indeks kebahagiaan, oleh karenanya target kinerja Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tabel 2.11

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2022

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	108,81	96,85	11,96

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	EFISIENSI (%)
	Penunjang Perekonomian Dan Aksessibilitas			
2	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	104,34	93,42	10,92
3	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	97,14	94,71	2,43
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100,25	87,84	12,41
5	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	95,52	99,76	-4,25
6	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	99,02	99,90	-0,88
7	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	79,6	94,74	-15,14
8	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	105,63	97,24	8,38
9	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	203,405	96,17	222,83
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	101,17	71,34	29,83
11	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	56,13	85,16	-29,03
12	Meningkatnya Nilai Investasi	92,63	98,54	-5,91
13	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	112,62	97,86	14,76
14	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	68,14	90,22	-22,08
15	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	97,08	94,13	2,95
16	Meningkatnya Kemandirian Desa	101,12	98,46	2,66
Rata-rata efisiensi				8,21

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 terjadi efisiensi anggaran. Tingkat efisiensi sumberdaya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai rata-rata sebesar 8,21%.

F. Analisis Program Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026, Tema pembangunan pada tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung oleh Sektor Unggulan”, dengan didukung program-program prioritas dalam pencapaian pada setiap misi yang dijabarkan pada tabel-tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.12

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksessibilitas	Indeks Infrastruktur	68	73,99	108,81	Program Penyelenggaraan Jalan	85.918.478.393	83.203.014.912	96,84
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.453.939.621	6.306.000.242	97,71
					Program Kawasan Permukiman	2.498.851.000	2.464.252.700	98,62
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	281.069.000	280.759.000	99,89
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	45.045.685.000	44.509.517.000	98,81
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.948.498.000	3.908.223.981	98,98
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.546.719.965	8.057.930.977	84,41

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	698.800.000	698.224.900	99,92
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.858.009.500	4.856.317.783	99,97
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.634.343.010	1.613.703.125	98,74
					Program Penataan Bangunan Gedung	3.547.250.040	3.410.487.342	96,14
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	631.220.000	576.570.785	91,34
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	149.102.600	119.845.450	80,38
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	825.000.000	806.107.393	97,71

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Program Pengembangan Perumahan	320.426.000	280.773.483	87,63
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100.000.000	86.273.422	86,27
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2.929.048.208	2.854.777.900	97,46
					Program Penatagunaan Tanah	647.400.000	640.361.714	98,91
						170.033.840.337	**164.673.142.109**	**96,85**

Sasaran meningkatnya pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Aksesibilitas dengan indikator indeks infrastuktur tercapai 108,81% didukung 18 (delapan belas) program dengan total anggaran Rp. 170.033.840.337,- dan realisasi anggaran Rp. 164.673.142.109,- / 96,85%. Program tersebut dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Perhubungan.

Indeks Infrastruktur adalah indeks yang menunjukkan kualitas pembangunan infrastruktur ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu jalan dengan kondisi mantap, rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak.

1. Jalan dengan kondisi mantap Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 sebesar 58,25% sepanjang 800,36 meter sedangkan Panjang total jalan Kabupaten 1.374 m
2. Rumah tangga dengan akses air minum layak: Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 76,51
3. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target 96,5% terealisasi 95,69% dengan capaian 99,06%

Tabel 2.11

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,26	64,96	104,34	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	327.182.000	307.335.260	93,93
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	253.550.000	250.155.825	98,66
					Program Pengelolaan Persampahan	7.267.544.000	6.706.423.593	92,28
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.472.296.500	1.433.738.886	97,38
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	13.000.000	11.904.430	91,57
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap	78.900.000	78.710.200	99,76

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	39.872.500	39.092.750	98,04
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	58.625.000	57.468.250	98,03
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.000.000	14.446.300	96,31
						9.525.970.000	8.899.275.494	93,42

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan Pemerintah. Analisis dan penilaian di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meliputi 3 (tiga) komponen yaitu Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), dan Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Rekapitulasi dari ketiga komponen tersebut merupakan nilai akhir dan menjadi ranting terhadap kondisi lingkungan di sebuah kawasan yaitu kondisi Buruk, Sedang, ataupun Baik.

Tahun 2021 capaian target RPJMD 2016-2021 masih menggunakan perhitungan lama, sedangkan capaian Tahun 2022 menggunakan RPJMD 2021-2026 dengan perhitungan baru. Untuk tahun 2021 indikator yg digunakan ITH : indeks tutupan lahan sebagaimana dalam Permen LHK nomor 78 Tahun 2016, perhitungan nya berdasarkan jumlah. Tahun 2022 yg digunakan indeks kualitas lahan (IKL) sesuai Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021, perhitungannya berdasarkan data spasial. Target IKL juga disesuaikan dengan SE Menteri Lingkungn Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan rancangan Pembangunan jangka menengah Daerah berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2022, indeks kualitas udara 88,74%, Indeks kualitas air 60% dan Indeks tutupan lahan 29,49%. Secara keseluruhan capaian IKLH Kabupaten pada tahun 2022 ini sebesar 64,96 / kategori sedang dan mencapai target RPJMD Tahun 2022.

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dengan indikator IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) didukung oleh 9 (Sembilan) program dengan anggaran Rp. 9.525.970.000 terealisasi 93,42%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.12

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,63	0,612	97,14	Program Pengelolaan Pendidikan	132.621.889.801	126.427.241.829	95,33
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	10.399.940.000	9.016.239.801	86,70
					Program Pengembangan Kurikulum	40.000.000	39.695.000	99,24
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	26.840.000	10.891.000	40,58
					Program Pembinaan Perpustakaan	865.584.000	847.820.440	97,95
						143.954.253.801	136.341.888.070	94,71

Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. Harapan lama sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebesar 12,66 sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pacitan sebesar 7,82.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan dengan indikator Indeks Pendidikan tercapai 97,14% didukung oleh 5 (lima) program dengan anggaran Rp. 143.954.253.801 terealisasi 94,71%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Tabel 2.13

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,805	0,807	100,25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.888.758.636	99.867.257.221	87,69
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.931.135.832	10.074.832.699	84,44
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	277.745.000	275.518.830	99,20
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.825.421.168	1.766.421.840	96,77
					Program Pengendalian Penduduk	179.990.000	152.901.868	84,95
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.346.840.050	6.213.439.500	97,90

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.657.307.700	2.078.216.421	78,21
						137.107.198.386	120.428.588.379	87,84

Derajat Kesehatan merupakan gambaran profil Kesehatan pada suatu daerah yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebesar 72,48. Semakin tinggi angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status Kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan yang akan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan tercapai 100,25% didukung oleh 7 (tujuh) program dengan anggaran Rp. 137.107.198.386,00 terealisasi 87,84%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta unit kerja dibawahnya yaitu Rumah Sakit Dr. Darsono dan 24 (dua puluh empat) Puskesmas dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Tabel 2.14

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.615.099	9.184.000	95,52	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	82.500.000	82.303.969	99,76

Daya beli masyarakat adalah seberapa tinggi tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat luas dalam membeli serta mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Faktor penentu daya beli masyarakat adalah harga barang serta jasa. Kemampuan daya beli masyarakat akan cenderung menurun ketika harga-harga produk dan jasa mengalami kenaikan. Namun kebalikannya, kemampuan beli masyarakat nantinya akan meningkat apabila harga-harga tersebut menurun. Untuk mengukur daya beli masyarakat digunakan indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Rp. 9.184.000,00 mengalami kenaikan 3,34% dari Tahun 2021 yang menandakan bahwa daya beli masyarakat Pacitan meningkat.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat dengan indikator Pengeluaran per kapita tercapai 95,52% didukung oleh 1 (satu) program dengan anggaran Rp. 82.500.000,00 terealisasi 99,76%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Tabel 2.15

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	85,93	85,09	99,02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	263.305.000	263.053.641	99,90
					Program Perlindungan Perempuan	90.000.000	89.815.243	99,79
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	38.000.000	37.946.673	99,86
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	12.000.000	11.935.200	99,46
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	32.000.000	31.929.140	99,78

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Program Perlindungan Khusus Anak	49.592.100	49.415.800	99,64
						484.897.100	484.095.697	99,83

Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundangundangan yang dihasilkan oleh negara maupun lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pacitan Tahun 2022 85,09 mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 0,26%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) tercapai 99,02% didukung oleh 6 (enam) program dengan anggaran Rp. 484.897.100,00 terealisasi 99,83%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga berencana dan Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak.

Tabel 2.16

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	72,5	79,6	109,79	Program Pengembangan Kebudayaan	300.000.000	293.056.300	97,69
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.288.596.573	4.961.062.244	93,81
					Program Pemberdayaan Sosial	273.458.845	262.906.544	96,14
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.038.878.600	7.543.504.000	93,84
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non	693.668.000	685.052.580	98,76

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Kebakaran			
					Program Penanggulangan Bencana	1.102.790.000	1.030.730.697	93,47
					Program Rehabilitasi Sosial	447.573.900	431.587.800	96,43
					Program Penanganan Bencana	243.824.700	221.707.300	90,93
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	85.000.000	84.393.520	99,29
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	612.200.000	604.659.730	98,77

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.465.000.000	3.452.672.603	99,64
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	375.000.000	373.350.000	99,56
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.175.000.000	812.939.000	69,19
					Program Pembinaan Sejarah	250.000.000	249.552.950	99,82
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	35.000.000	31.530.000	90,09
					Program Pengelolaan	15.000.000	14.560.000	97,07

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Permuseuman			
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	882.863.398	866.470.014	98,14
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	142.441.800	139.006.350	97,59
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	317.350.000	313.955.875	98,93
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	1.070.170.000	1.065.920.960	99,60

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Organisasi Kemasyarakatan			
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	256.696.200	253.454.600	98,74
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.229.310.000	1.223.583.738	99,53
						26.299.822.016	24.915.656.805	94,74

Indeks Kebahagiaan adalah ukuran tingkat kebahagiaan penduduk, Sebagai ukuran kesejahteraan subjektif. Semakin tinggi nilai indeks kebahagiaan menunjukkan kondisi yang semakin bahagia. Pola yang searah bila indeks disandingkan dengan data indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan telah berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan subjektif. Indeks kebahagiaan Tahun 2022 tercapai 109,79% didukung 22 (dua puluh dua) program dengan anggaran sebesar Rp. 26.299.822.016,00 terealisasi 94,74%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Satpol-PP, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Indeks kebahagiaan Tahun 2021 belum diukur karena belum menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Tabel 2.17

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,32	0,338	97,35	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	960.500.000	935.584.760	97,41
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	13.000.000	12.034.000	92,57

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.000.000	38.886.500	97,22
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	41.000.000	38.931.848	94,96
						1.054.500.000	1.025.437.108	97,24

Indeks Gini menggambarkan tingkat Pemerataan Pendapatan Masyarakat/ tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kabupaten Pacitan 0,338 menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat kabupaten Pacitan relatif merata. Dibandingkan dengan tahun lalu menurun 5,63% yang menandakan adanya sedikit ketimpangan pendapatan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indeks Gini tercapai 97,35% didukung oleh 4 (empat) program dengan anggaran Rp. 1.054.500.000,00 terealisasi 97,24%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai penyumbang kontribusi terbesar PDRB menurut lapangan usaha.

Tabel 2.18

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	-3,4	-0,21	319%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.448.940.000	2.437.929.195	99,55
	Pendapatan per kapita (juta/orang/ tahun)	34.549.315	30.340.000	87,82	Program Pengembangan Umkm	235.500.000	234.982.323	99,78
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.802.644.000	3.466.422.418	91,16
					Program Perencanaan Tenaga	2.501.000	2.501.000	100,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Kerja			
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.141.676.148	2.083.917.740	97,30
					Program Penempatan Tenaga Kerja	1.237.500.000	1.224.617.295	98,96
					Program Hubungan Industrial	50.000.000	49.708.800	99,42
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	43.000.000	42.821.192	99,58
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	463.000.000	461.264.021	99,63
					Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp	68.800.000	68.617.120	99,73

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Koperasi			
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	404.200.000	403.140.575	99,74
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	136.500.000	133.390.115	97,72
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	55.000.000	54.999.800	100,00
						11.089.261.148	10.664.311.594	96,17

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat dengan indikator Prosentase Pertumbuhan PAD tercapai 319% didukung oleh 1 (satu) program dengan anggaran Rp. 2.448.940.000 terealisasi 99,55%. Program tersebut dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah. Pertumbunan PAD bersumber dari pajak daerah 25,30%, retribusi daerah 16,12%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1,73 dan lain-lain PAD yang sah 56,84%.

Sedangkan Indikator pendapatan perkapita tercapai 87,82 % dari target tahun 2022. Indikator ini didukung oleh 10 (sepuluh) program dengan anggaran 8.640.321.148 terealisasi 96,17%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian.

Tabel 2.19

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.773.911.349	2.820.635.400	101,68	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.824.278.900	4.399.411.779	91,19
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.931.150.000	3.871.866.681	98,49
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	5.316.742.222	320.303.583	6,02

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Program Penyuluhan Pertanian	789.775.000	544.551.200	68,95
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	710.465.000	706.329.260	99,42
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	686.895.000	684.379.529	99,63
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	591.670.000	587.299.889	99,26
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.575.912.000	1.257.759.637	79,81
					Program Perizinan Usaha Pertanian	25.000.000	17.873.000	71,49
						18.451.888.122	12.389.774.558	67,15

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.187.799.547	2.169.782.800	99,18	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	150.000.000	143.659.535	95,77
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1.000.000	1.000.000	100,00
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.151.579.340	2.134.135.423	99,19
					Program Pengembangan Ekspor	4.002.000	3.772.000	94,25
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	99.848.000	99.587.869	99,74
						2.406.429.340	2.382.154.827	98,99

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	767.230.000	652.215.151	85,01
					Rogram Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	19.000.000	17.138.900	90,20
	PDRB Industri Pengolahan	804.425.160	825.851.900	102,66		786.230.000	669.354.051	85,13
						21.644.547.462	15.441.283.436	71,34

Sasaran meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan dilihat melalui angka PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dan PDRB Industri Pengolahan

Struktur perekonomian Pacitan pada tahun 2022 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut menyumbang 27,58 persen PDRB Kabupaten Pacitan. Lapangan Usaha dengan kontribusi besar selanjutnya adalah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reperasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,79 persen; Konstruksi sebesar 15,06 persen; Industri Pengolahan sebesar 7,07 persen; Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,93 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,37 persen. Sementara lapangan usaha lain memberikan kontribusi kurang dari 5 persen. Lapangan usaha dengan kontribusi terendah adalah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,03 persen; Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,09 persen; dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,26 persen.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini sebanyak 16 (enam belas) program dengan anggaran Rp. 21.644.547.462 terealisasi 71,34%.program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Tabel 2.20

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pariwisata

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,1	1,74	56,13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	16.302.192.000	13.512.612.207	82,89
					Program Pemasaran Pariwisata	711.808.100	691.785.090	97,19
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.495.129.900	2.410.168.019	96,59
						19.509.130.000	16.614.565.316	85,16

Daya saing sektor pariwisata adalah kapasitas usaha pariwisata untuk menarik pengunjung asing maupun domestik yang berkunjung pada suatu tujuan wisata tertentu. Faktor-faktor penentu daya saing pariwisata antara lain:

- Human Touris Indikator (HTI) merupakan rasio antara jumlah aktivitas wisatawan mancanegara dan domestic dengan jumlah penduduk Pacitan. Hasil HTI Tahun 2022 sebesar 1,511 / tahap berkembang
- Price Competitiveness Indikator (PCI) menunjukkan tingkat kemampuan konsumsi wisatawan dalam berwisata di Kabupaten Pacitan. Nilai PCI Tahun 2022 sebesar 2,096/tahap penyempurnaan;
- Infrastrukture Development Indikator (IDI) menunjukkan perkembangan jalan raya, perbaikan fasilitas sanitasi dan peningkatan akses penduduk terhadap fasilitas air bersih dengan nilai pada Tahun 2022 sebesar 1,702 / tahap berkembang
- Environment Indikator (EI) menunjukkan kualitas lingkungan dan kesadaran penduduk dalam memelihara lingkungannya dengan nilai pada Tahun 2022 sebesar 0,901/ tahap belum berkembang;
- Technology Advancement Indikator (TAI) menunjukkan perkembangan infrastruktur dan teknologi modern dengan meluasnya internet, telepon seluler dan teknologi lainnya. Nilai TAI Tahun 2022 sebesar 1,989/ tahap berkembang. Kenaikan penggunaan internet (media sosial) Kabupaten Pacitan dapat membawa keuntungan yakni dapat meningkatkan penyebarluasan potensi wisata di Kabupaten Pacitan jika dimanfaatkan dengan baik.
- Human Resources Indikator (HRI) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indikator kesehatan, indeks pendidikan, dan indikator ekonomi BPS. Semakin tinggi tingkat Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi penduduk maka akan memberikan pelayanan dan informasi yang baik kepada wisatawan yang akan berkunjung. Nilai HRI Tahun 2022 sebesar 2,136 / tahap penyempurnaan;
- Openes Indikator (OI) menunjukkan tingkat keterbukaan destinasi terhadap perdagangan internasional dan kedatangan wisatawan internasional. Nilai OI Tahun 2022 sebesar 2,062 / tahap penyempurnaan;
- Social Development Indikator (SDI) menunjukkan kenyamanan dan keamanan wisatawan untuk berwisata di suatu destinasi. Nilai SDI Tahun 2022 sebesar 1,524/tahap berkembang

Dari kedelapan indikator dapat terlihat bahwa terdapat indikator yang berada dalam tahap berkembangan maupun tahap belum berkembang. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan pariwisata hingga sampai ke tahap penyempurnaan diperlukan kebijakan pengelola destinasi pariwisata ke arah yang lebih baik.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini sebanyak 3 (tiga) program dengan anggaran Rp. 19.509.130.000 terealisasi 85,16%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata,Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.

Tabel 2.21

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	8	7,41	107,96	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40.000.000	39.964.900	99,91
					Program Promosi Penanaman Modal	95.620.400	93.959.900	98,26
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	385.492.000	376.250.615	97,60
					Program Pelayanan Penanaman Modal	210.860.000	209.864.320	99,53
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	89.480.000	89.415.609	99,93
						821.452.400	809.455.344	98,54

Parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Semakin tinggi angka ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi semakin rendah. Nilai ICOR Tahun 2022 tercapai 107,96 didukung oleh 5 (lima) program dengan anggaran Rp. 821.452.400,00 terealisasi 98,54%.

Tabel 2.22

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,85	2,34	126,49	Program Aplikasi Informatika	1.400.746.000	1.392.820.632	99,43
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.179.419.420	1.172.703.495	99,43
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	272.500.000	271.391.650	99,59
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	10.340.000	10.207.000	98,71
						2.863.005.420	2.847.122.777	99,45
	Nilai IKM	83,68	82,63	98,75	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.490.400	136.780.225	94,66

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	997.561.510	986.345.947	98,88
					Program Pendaftaran Penduduk	15.859.373	12.393.700	78,15
					Program Pencatatan Sipil	85.382.000	84.731.632	99,24
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	39.909.600	39.690.580	99,45
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.300.358.508	4.875.106.924	91,98
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16.051.333.862	15.974.537.724	99,52
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	472.895.100	457.354.755	96,71

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Umum			
						23.107.790.353	22.566.941.487	97,66
						25.970.795.773	25.414.064.264	97,86

Sasaran meningkatnya layanan public yang innovative terdapat 2 (dua) indikator yaitu indeks SPBE dan Nilai IKM. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 adalah 2,34 dengan predikat cukup. Hasil ini lebih tinggi dari angka yang ditargetkan yaitu 1,85. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 didapatkand dari survey elektronik "SuKMa-e"Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mereplikasi inovasi dari Pemerintah Provinsi jawa Timur dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara elektronik (SuKMa-e) dengan nilai 82,63 atau masuk kategori baik. Dengan diterapkannya SuKMa-e tersebut diharapkan kegiatan survei ini menjadi lebih efektif dan efisien karena penerima layanan tidak perlu mengisi kuesioner yang berupa lembaran kertas. Dalam melaksanakan survei, penerima layanan cukup men-scan QR Code SuKMa-e yang telah terpasang.

Sasaran meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif didukung oleh 13 (tiga belas) program dengan anggaran Rp. 25.970.795.773,00 terealisasi 97,86% dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Tabel 2.23

Analisis Efisiensi Sasaran Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pengembangan Kapasitas (ASN)	Indeks Profesionalitas	77	52,47	68,14	Program Pengembangan	2.021.462.850	1.986.429.960	98,27

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pemerintah Daerah	Aparatur				Sumber Daya Manusia			
					Program Kepegawaian Daerah	1.723.176.010	1.391.919.438	80,78
						3.744.638.860	3.378.349.398	90,22

Sasaran pengembangan Kapasitas ASN menggunakan indikator Indeks Profesionaltas Aparatus dengan nilai 52,47 kategori sangat rendah. Nilai tersebut dipengaruhi oleh kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai dimana nilai kualifikasi, kompetensi dan kinerja masih rendah. untuk memenuhi nilai kualifikasi makan aparatur harus menyesuaikan Pendidikan dengan jabatan yang dilaksanakan. nilai kompetensi dapat ditingkatkan dengan mengikuti penilaian kompetensi dan peningkatan kinerja aparatur harus didorong peningkatan kinerja dari masing-masing aparatur.

Sasaran ini didukung oleah 2 (dua) program dengan anggaran Rp. 3.744.638.860,00 terealisasi 90,22% dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Tabel 2.24

Analisis Efisiensi Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	75	68,44	91,25	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	1.291.342.440	1.206.503.793	93,43

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pembangunan Daerah			
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.775.223.104	1.762.323.975	99,27
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	284.244.007.075	281.995.544.101	99,21
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	484.140.000	483.572.150	99,88
					Program Pengelolaan Arsip	332.310.000	328.469.905	98,84
					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	89.190.000	83.604.400	93,74
						288.216.212.619	285.860.018.324	99,18
	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	Program Penyelenggaraan	853.600.000	770.328.914	90,24

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pengawasan			
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	537.694.100	510.028.714	94,85
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	670.000.000	659.092.834	98,37
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.278.384.585	3.086.785.220	94,16
						5.339.678.685	5.026.235.682	94,13
	Maturitas SPIP	3	3	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	930.672.899.041	801.571.371.104	86,13

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan terdapat 3 (tiga) indikator yaitu nilai sakip, Opini BPK dan Maturitas SPIP. Nilai sakip Tahun 2022 sebesar 68,44 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021. Terdapat beberapa rekomendasi terkait perencanaan dan mekanisme evaluasi internal. Hasil Opini BPK Tahun 2022 belum dirilis. Maturitas SPIP

berada pada tingkat 3 Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Sasaran ini didukung oleh 11 (sebelas) program dengan anggaran Rp.1.224.228.790.345 terealisasi 89,24% dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah

Tabel 2.25

Analisis Efisiensi Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	36,69	37,1	101,12	Program Penataan Desa	50.000.000	49.747.100	99,49
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	173.645.000	172.854.650	99,54
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.018.357.135	3.855.269.436	95,94
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum	823.500.000	818.880.528	99,44

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Adat			
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.259.954.600	8.227.335.871	99,61
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	978.333.300	959.507.549	98,08
						14.303.790.035	14.083.595.134	98,46

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator prosentase desa mandiri tercapai 101,12% didukung oleh 6 (enam) program dengan anggaran Rp. 14.303.790.035 terealisasi 98,46%. Program ini dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III
CAPAIN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/ atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah perwujudan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa,

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2022 mencakup Urusan Wajib dan Pilihan meliputi ***Urusan Perdagangan*** dan ***Urusan Pertanian.***

Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Pacitan pada Tahun 2022 seluruhnya sebesar Rp. 5.212.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.608.446.050 atau 88,41 % terdiri dari :

A. Urusan Wajib sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.437.081.050,00 atau 81,24 %.

B. Urusan Pilihan sebesar Rp. 2.212.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.171.365.000,00 atau 98,14 %.

Adapun Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

A. Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2021 Tentang APBN Tahun Anggaran 2022

B. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8634/KPTS/PK.010/F/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2022

C. Keputusan Direktur Jendera Nomor: 8634/KPTS/PK.010/F/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2022

D. DIPA-018.08.4.059186/2022 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tanggal 17 November 2021

E. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2022 Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.08.0000/001/2022 tanggal 1 Januari 2022;

F. SP DIPA: 018.08.4.059185/2022 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tanggal 17 November 2021;

G. Dasar Hukum DIPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur REVISI 3 Nomor : DIPA-018.04.4.059179 / 2021 Tanggal 3 Mei 2021

H. Dasar Hukum DIPA PA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3 Nomor : SP DIPA-018.03.4.059178/2022 Revisi 5 Tanggal 3 Juni 2022

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang diterima untuk mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 pada

Urusan Wajib Perdagangan dan Urusan Pilihan Pertanian dengan Program-program sebagai berikut :

A. Urusan Wajib

1) Urusan Perdagangan

Pelaksanaan tugas pembantuan pada pada urusan perdagangan diprioritaskan pada 1 program adalah sebagai berikut :

1. Program Perdagangan Dalam Negeri.

2) Urusan Pertanian

Pelaksanaan tugas pembantuan pada pada urusan pertanian diprioritaskan pada 3 program adalah sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penilaian Nila Tambah dan Daya Saing Industri

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

A. Target Kinerja

Target kinerja tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target Kinerja Tugas Pembantuan yang diberikan Oleh Pemerintah Pusat

No		Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
1		**Program Perdagangan Dalam Negeri**		
	A	**Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas**		
		Kontruksi Fisik Pembangunan / Revitalisasi Pasar Bandar	±540 m2	Desa Bandar Kecamatan Bandar
2		**Program Ketersediaan Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		
	A	**Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Kecil (Kambing dan Domba) dan Unggas (Ayam) pada Pusat Veteriner Farma Tahun Anggaran 2022**		

No		Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
	1)	Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Kecil (Kambing Lokal)	2 paket (@2 ekor jantan, 23 ekor betina)	1. Poktan Ngudi Tani Desa Pagerlor Kec. Sudimoro 2. Poktan Guyup Rukun 03 Desa Tremas Kec. Arjosari
	2)	Kegiatan Pengembangan Ternak Unggas (Ayam)	2 paket (@500 ekor)	1. Poktan Purwodadi Desa Punung Kec. Punung 2. Poktan Guyup Rukun 04 Desa Tremas Kec. Arjosari
	B	**Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022**		
	1)	Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (sapi)	4 paket (@15 ekor)	Poktan Adil Makmur I, Poktan Adil Makmur II, Poktan Adil Makmur III, dan Poktan Adil Makmur IV Desa Arjosari Kec. Arjosari

B. Realisasi

Realisasi kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementerian Perdagangan RI	Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2021 Tentang APBN Tahun Anggaran 2022	**Program Perdagangan Dalam Negeri**								
			Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Tahun Anggaran 2022								
			Kontruksi Fisik Pembangunan / Revitalisasi Pasar Bandar ±540 m2	Desa Bandar Kecamatan Bandar	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 2.437.081.050,00	**81,23**	±540 m2	**100**	
2	Pusvetma (Pusat	Keputusan Direktur	**Program Ketersediaan Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas**								

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
	Veteriner Farma);	Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8634/KPTS/PK.010/F/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2022									
			Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Kecil (Kambing dan Domba) dan Unggas (Ayam) pada Pusat Veteriner Farma Tahun Anggaran 2022								
			Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Kecil (Kambing Lokal) 2 paket (@2 ekor jantan, 23 ekor betina)	3. Poktan Ngudi Tani Desa Pagerlor Kec. Sudimoro Poktan Guyup Rukun 03 Desa Tremas Kec. Arjosari	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	(Diberikan dalam bentuk Barang)	(Diberikan dalam bentuk Barang)	**100**	2 paket (@2 ekor jantan, 23 ekor betina)	**100**	
			Kegiatan Pengembangan Ternak Unggas (Ayam) 2 paket (@500 ekor)	1. Poktan Purwodad	Dinas Ketahan	(Diberikan dalam bentuk Barang)	(Diberikan dalam bentuk Barang)		2 paket (@500	**100**	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
				i Desa Punung Kec. Punung 2. Poktan Guyup Rukun 04 Desa Tremas Kec. Arjosari	an Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan				ekor)		
3	BBIB Singosari;	Keputusan Direktur Jendera Nomor: 8634/KPTS/PK.010/F/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Petunjuk	**Program Ketersediaan Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas**								
			Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2022								
			Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong (sapi) 4 paket (@15 ekor)	Poktan Adil Makmur I, Poktan Adil Makmur II, Poktan Adil	Dinas Ketahanan Pangan dan	(Diberikan dalam bentuk Barang)	(Diberikan dalam bentuk Barang)	**100**	4 paket (@15 ekor)	**100**	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
		Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2022		Makmur III, dan Poktan Adil Makmur IV Desa Arjosari Kec. Arjosari	Pertanian Kabupaten Pacitan						

3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

A. Target Kinerja

Target kinerja tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada pemerintah daerah kabupaten pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Target Kinerja Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
1	**Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		
a	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2022	1 paket	Poktan Gemah Ripah 5 Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo
2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**		
a	Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi a. Kambing Peranakan Etawa (PE) Galur Senduro b. Pakan Konsentrat Kambing Perah	a. 3 paket (@2 ekor jantan, 20 ekor betina) b. 1 paket (600 kg) 2 paket (@200kg)	a. Pokmas Wonomulyo dan Pokmas Berkah Lohjinawi Desa Wonodadi Kulon Kec. Ngadirojo b. Pokmas Margo Tlaten Desa Pagutan Kec. Arjosari
b	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Tahun Anggaran 2022		
	Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian 1) Irigasi Perpipaan 2) Embung Pertanian 3) Irigasi Perpompaan Besar	1) 2 Unit 2) 1 Unit 3) 1 Unit 4) 16 Unit 5) 1 Paket	1) Desa Ngumbul Kec,Tulakan, Desa Kalipelus Kec.Kebonagung 2) Desa Bangunsari

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
	4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 5) Pengelolaan sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsin 6) Fasilitas Pupuk Dan Pestisida 7) Penyusunan E-RDKK pendataan penerima pupuk bersubsidi 8) Dukungan Manageman dan Dukungan Teknis Ditjen PSP	6) 1 Paket 7) 1 Paket 8) 1 Paket	3) Desa Bandar Kec.Bandar 4) 1 Desa Katipugal Kec. Kebonagung 2 Desa Desa Ketro Kec.Tulakan 3 Desa Desa Sedayu Kec.Arjosari 4 Desa Bandar Kec. Bandar 5 Desa Watupatok Kec.Bandar 6 Desa Tumpuk Kec.Bandar 7 Desa Nbgunut kec.Bandar 8 Desa Kledung Kec.Bandar 9 Desa Bangunsari Kec. Bandar 10 Desa Jeruk Kec.Bandar 11 Desa Nawangan Kec.Nawangan 12 Desa Nawangan Kec.Nawangan 13 Desa Tokawi Kec.Nawangan 14 Desa Ngromo Kec.Nawangan 15 DesaJetis lor Kec.Nawangan 16 Desa Sempu Kec.nawang 5) Kab.Pacitan

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi
			6) Kab.Pacitan 7) Kab.Pacitan 8) Kab.Pacitan

B. Realisasi

Realisasi kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	DIPA-018.08.4.059 186/2022 tanggal 17 November 2021	**Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas**								
			Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2022								
			Irigasi Perpipaan 1 keg	Poktan Gemah Ripah 5 Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten	92.000.000	92.000.000	**100**	1 keg	**100**	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
					Pacitan						
2	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2022 Nomor: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.08.0000/001/2022 tanggal 1 Januari 2022;	**Program: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**								
			Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2022								
			Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Serta Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi : a. Kambing Peranakan Etawa (PE) Galur Senduro 3 paket	a. Pokmas Wonomulyo dan Pokmas Berkah Lohjinawi Desa Wonodadi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	(Diberikan dalam bentuk Barang)	(Diberikan dalam bentuk Barang)	**100**	a. 3 paket (@2 ekor jantan, 20 ekor betina) b. 1 paket	**100**	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			(@2 ekor jantan, 20 ekor betina) b. Pakan Konsentrat Kambing Perah 1 paket (600 kg) 2 paket (@200kg)	Kulon Kec. Ngadirojo b. Pokmas Margo Tlaten Desa Pagutan Kec. Arjosari					(600 kg) 2 paket (@200kg)		
			Kegiatan Pengembangan Ternak Unggas (Ayam) 2 paket (@500 ekor)	3. Poktan Purwodadi Desa Punung Kec. Punung 4. Poktan Guyup Rukun 04 Desa Tremas Kec. Arjosari	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	(Diberikan dalam bentuk Barang)	(Diberikan dalam bentuk Barang)		2 paket (@500 ekor)	**100**	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
3	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	SP DIPA: 018.08.4.059 185/2022 Tanggal 17 November 2021	**Program Ketersediaan Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas**								
			Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi								
			Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian 1) Irigasi Perpipaan 2) Embung Pertanian 3) Irigasi Perpompaan Besar 4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 5) Pengelolaan sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsin 6) Fasilitas Pupuk Dan Pestisida 7) Penyusunan E-RDKK pendataan penerima pupuk	1) Desa Ngumbul Kec,Tulakan, Desa Kalipelus Kec.Kebonagung 2) Desa Bangunsari 3) Desa Bandar Kec.Bandar 4) 1 Desa Katipugal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	2.019.360.000	1.978.545.000,	**97,98**	1)2 Unit 2)1 Unit 3)1 Unit 4)16 Unit 5)1 Paket 6)1 Paket 7)1 Paket **8)**1 Paket	**100**	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			bersubsidi 8) Dukungan Manageman dan Dukungan Teknis Ditjen PSP	Kec. Kebonagung 2 Desa Desa Ketro Kec.Tulakan 3 Desa Desa Sedayu Kec.Arjosari 4 Desa Bandar Kec. Bandar 5 Desa Watupatok Kec.Bandar 6 Desa Tumpuk Kec.Bandar 7 Desa Nbgunut							

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
				kec.Bandar 8 Desa Kledung Kec.Bandar 9 Desa Bangunsari Kec. Bandar 10 Desa Jeruk Kec.Bandar 11 Desa Nawangan Kec.Nawangan 12 Desa Nawangan Kec.Nawangan 13 Desa							

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
				Tokawi Kec.Nawangan 14 Desa Ngromo Kec.Nawangan 15 DesaJetislor Kec.Nawangan 16 Desa Sempu Kec.nawang 5) Kab.Pacitan 6) Kab.Pacitan 7) Kab.Pacita 8) Kab.Pacitan							
4	Dinas	DIPA REVISI	**Program Penilaian Nilai**								

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
	Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	3 Nomor : DIPA-018.04.4.059 179 / 2021 Tanggal 3 Mei 2021	**Tambah Dan Daya Saing Industri**								
			Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura : 1) Sarana Pemasaran 1 keg	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	83.450.000	83.420.000	**99,96**	1 Keg	**100**	
5	Dinas Pertani	SP DIPA-018.03.4.059	**Program Ketersediaan ,Akses dan Konsumsi Pangan**								

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
	an dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	178/2022 Revisi 5 Tanggal 3 Juni 2022	**Berkualitas**								
			Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan a. Pengawalan, Pembinaan, Monev Sarana Pascapanen TP 1 keg b. Sarana pasca panen tanaman pangan 13 unit	a.Kab.Pacitan b.Power Thresher 10 unit sebagai berikut : Kebonagung 2 unit , Bandar 2 unit, Tulakan 1 unit, Nawangan 2 unit, Donorojo 2 unit, Tegalombo 1 unit)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	17.600.000	17.400.000	**98,86**	a. 1 Keg b. 13 Unit	**100**	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
				Corn sheller 3 unit (kec Tegalombo 2 unit, Pringkuku 1 unit)							
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	-	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**								

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia a. Bantuan Benih Padi Inbrida 3.000 (75 kg) **b.** Bantuan Benih Jagung 100 ha (1.500 kg)	a. 12 Kecamatan b. Kec.Punung dan Bandar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	(Diberikan dalam bentuk Barang)	(Diberikan dalam bentuk Barang)	**100**	a.3.000 (75 kg) b.100 ha (1.500 kg)	**100**	
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	-	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**								
			Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi TP	Kec Arjosari, Pringkuku,	Dinas Ketahanan	(Diberikan dalam bentuk	(Diberikan dalam bentuk	**100**	50 ha (50.000	**100**	

NO	K/LNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM,KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			Bantuan Benih Pupuk Organik non Subsidi (Ubi Kayu) 50 ha (50.000 kg)	Tegalombo, Sudimoro	Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Barang)	Barang)		kg)		

3.4. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh daerah adalah sebagai berikut :

Pagu tidak terserap semua, terutama rekening perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan pasca panen ke provinsi karena memang tidak melakukan perjalanan dinas.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Solusi yang diusulkan adalah sebagai berikut :

Sebagai bahan evaluasi tahun depan agar perencanaan anggaran dan bentuk kegiatan dapat optimal.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 adalah sebagai berkut :

4.1 Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat salah satunya adalah pelayanan pendidikan.Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, disebutkan bahwa SPM bidang pendidikan meliputi :

a. SPM Pendidikan Anak Usia Dini
b. SPM Pendidikan Dasar
c. SPM Pendidikan Kesetaraan

4.1.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target Pencapaian Bidang Pendidikan

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Nilai (%)	Batas pencapaian
	INDIKATOR		
1	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	Setiap tahun
2	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	Setiap tahun
3	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100	Setiap tahun

4.1.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Tabel 4.2

Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator			Target RPJMD (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2022	79,41	13.114	79,41	10.976	83.72

2	Pendidikan Dasar	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	2022	99,19	68.371	99,19	66.736	96,8
3	Pendidikan Kesetaraan	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100	2022	100	67	100	67	100

4.1.3 Alokasi Anggaran

Alokasi untuk pencapaian SPM pendidikan berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TAHUN 2021				SUMBER DANA	
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	Batas waktu (Thn)		TARGET RPJMD (%)	REALISIASI CAPAIAN (%) SEMESTER II	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2022	96,8	99,19	96,8	**Program Pengelolaan Pendidikan**	APBD	132.621.889.801	
	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	2022	95	100	95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		78.056.337.886	
	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum	100	2022	94,87	100	94,87	Pengelolaan Pendidikan Sekolah		40.274.726.300	

	menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan						Menengah Pertama			
							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		12.384.925.615	
							Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan		1.905.900.000	

4.1.4 Dukungan Personil

Tabel 4.4

Daftar Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Instansi	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Pendidikan	93	47	140
3	Guru SMP + Staf TU	579	460	1.039
4	Guru SD + Penjaga	1.312	1.911	3.223
5	Guru TK	3	325	328
JUMLAH		**1.987**	**2.743**	**4.051**
Prosentase		**49,05**	**50,95**	

4.1.5 Permasalahan Dan Solusi

Tabel 4.8

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	▪ Masih belum terbangunnya sistem pendidikan yang baik untuk mendapatkan mendapatkan data base pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi) data sekolah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI, MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag; ▪ Dampak dari inovasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dalam memenuhi amanah dari Peraturan	• Melaksanakan Koordinasi dengan Kemenag • Mengoptimalkan kinerja Tim Pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara optimal guna mendapatkan data dan capaian kinerja di masing- masing SPM Bidang Pendidikan (PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan).
2	Prosentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
3	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang		

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
	perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 belum dapat meningkatkan pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara maksimal karena belum teranggarkan secara spesifik dan memadai di Tahun Anggaran 2022.	

4.2 Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Bab II Menjelaskan ada 12 Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b. Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
d. Pelayanan Kesehatan Balita
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

4.2.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

Target Pencapaian Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	Keterangan
		Indikator	Nilai		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94,94%	2022	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	Keterangan
		Indikator	Nilai		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,39%	2022	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86,37%	2022	
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehata Balita sesuai standard	100%	2022	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	22,29%	2022	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	50,07%	2022	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	19,58%	2022	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	76,73%	2022	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	86,26%	2022	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100%	2022	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	Keterangan
		Indikator	Nilai		
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai	44.32%	2022	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	74,79%	2022	

4.2.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Berikut ini adalah realisasi pencapaian SPM bidang kesehatan pada akhir tahun 2022 :

Tabel 4.10

Realisasi Pencapaian Bidang Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standard Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,31%	2022	95,31%	6754	95,31%	5931	87,81%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,94%	2022	94,94%	6447	94,94%	5471	84,86%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standard Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,39%	2022	99,39%	6140	99,39%	5330	86,81%
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	86,37%	2022	86,37%	31737	86,37%	29460	92,83%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standard Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100%	2022	100%	61297	100%	58320	95,22%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	22,29%	2022	22,29%	336619	22,29%	240258	71,37%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standard Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	50,07%	2022	50,07%	126530	50,07%	120998	95,63%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standard Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	19,58%	2022	19,58%	170908	19,58%	94432	55,3%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	76,73%	2022	76,73%	7635	76,73%	8212	107.56%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standard Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	86,26%	2022	86,26%	1134	86,26%	1197	103.94%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100%	2022	100%	5217	100%	6050	115,97%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standard Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	74,79%	2022	74,79%	6835	74,79%	7995	116.97%

4.2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi untuk pencapaian SPM pendidikan berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11

Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan

No	Pelayanan Dasar	Capaian Tahun	Capaian, Target, RencanaPembiayaanSPM Tahun 2022	SumberDana

	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)	2022	Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ kegiatan		Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*11*
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	2022	87,81%	95,31%	87,81%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		94.146.681.804,00		
2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	2022	94,94%	92%	91.86%		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	65.784.746.528,00	√	

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022	Capaian, Target, RencanaPembiayaanSPM Tahun 2022					SumberDana	
	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ kegiatan		Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
3	Persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	2022	84,86%	94,94%	84,86%				√	
4	Cakupan Pelayanan Kesehata Balita sesuai standard	100 %	2022	85,11%	86,37%	85,11%					

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022	Capaian, Target, RencanaPembiayaanSPM Tahun 2022					SumberDana	
	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ kegiatan		Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
5	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %	2022	95,14%	100 %	95,14%					

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022	Capaian, Target, RencanaPembiayaanSPM Tahun 2022					SumberDana	
	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ kegiatan		Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
6	Presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 %	2022	71,37%	22,29%	71,37%				√	

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022	Capaian, Target, RencanaPembiayaanSPM Tahun 2022					SumberDana	
	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ kegiatan		Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
7	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 %	2022	76,5%	50,07%	76,5%				√	

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022	Capaian, Target, RencanaPembiayaanSPM Tahun 2022					SumberDana	
	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ kegiatan		Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
8	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %	2022	43.56%	19,58%	43.56%				√	
9	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %	2022	100%	76,73%	100.00%				√	

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022	Capaian, Target, RencanaPembiayaanSPM Tahun 2022					SumberDana	
	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ kegiatan		Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
10	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100 %	2022	100%	86,26%	100.00%					
11	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100 %	2022	44.32%	100%	44.32%					

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022	Capaian, Target, RencanaPembiayaanSPM Tahun 2022					SumberDana	
	Indikator	Target Nasional	Batas Waktu (tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ kegiatan		Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
12	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100 %	2022	74,79 %	74,79%	100.00%				√	

4.2.4 Dukungan Personel

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil ataupegawai yang terlibat dalam proses penerapan danpencapaian SPM. Dukungan personil atau pegawai yangterlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Bidang Kesehatan didukung oleh dukungan personil di 24 Puskesmas, 3 Bidang, 1 Sekretariat dan 2 UPT di Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12

Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan

Pendidikan	Bidang Kesehatan		
	L	P	Total
SD/MI	1	1	2
SLTP/MTS	6	2	8
SMA/SMK	38	74	112
D1	2	6	8
D2	1	1	2
D3	266	317	583
S1	100	109	209
S2	8	4	12
JUMLAH	**309**	**537**	**936**

4.2.5 Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan yang sudah ditetapkan pada tahun 2022 ini di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan terkait pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Kurangnya Informasi mengenai pelayanan antenatal, pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas, Ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja Kabupaten/Kota, kendala biaya, sosial budaya	Pendataan ibu hamil untuk K1 murni secara lebih intensif dengan kegiatan sweeping bumil K1 by name by address, peningkatan kapasitas bidan dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan KIA di register kohort.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kurangnya informasi mengenai pelayanan persalinan, akses ke fasyankes sulit/jauh, ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota, kendala biaya, Sosial Budaya	Meningkatkan edukasi dan pemberian informasi kemasyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasidan aksesjalan dari rumah warga kepelayanan kesehatan, baik di dalam maupun di luar kabupaten/kota
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kurangnya informasi mengenai pelayanan bayibaru lahir, akses ke fasyankes sulit/jauh, pelayanan yang tidak teraporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas, bayi baru lahir mendapatkan pelayanan di Luar wilayah kerja kab/Kota, kendala biaya, Sosial Budaya	Melakukan edukasi kemasyarakat melalui Meningkatkan kunjungan petugas kesehatankeposyandu, rumah, tempat penitipan anak; melakukan pelayanan kesehatan termasuk imunisasi dasar, deteksi dini tumbuh kembang bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi (konseling).

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
4	Pelayanan kesehatan balita	Kurangnya informasi mengenai pelayanan balita, akses ke fasyankes sulit, pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas, balita mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja Kab/Kota, kendala biaya, sosial budaya	Memberikan edukasi kepada para orang tua saat pelaksanaan posyandu di wilayah setempat, Meningkatkan komunikasi dengan fasyankes swasta mengenai data terbaru serta berkordinasi secara intens
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Usia Pendidikan Dasar di luarsekolahtidakterskrining	Melakukan skrining rutin melalui stakeholder setempat
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut, sulitnya/jauhnya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan jejaring Puskesmas ke Puskesmas, adanya usia lanjut yang mendapat pelayanan di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota, terbatasnya biaya, masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang disebabkan salah satunya oleh faktor sosial dan budaya, adanya kematian/mortalitas usia lanjut, perpindahan penduduk/migrasi, ketersediaan sumber daya terbatas	Meningkatkan keaktifan dari kader atau tenaga kesehatanuntuk melakukanjemput bola.

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, Sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan	Melakukan manajemen dan perapian data , melakukan pengadaan inventarisir alat dan logistik
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan	Melakukan perapian data Memperbaiki manajemen informasi data Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata laksana penderita hipertensi melalui UKBM
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi (pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, pembiayaan dan penganggaran SPM Kesehatan	Melakukan perapian data Memperbaiki manajemen informasi data Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata laksana penderita Diabetes Melitus melalui UKBM
10	Pelayanan kesehatan orang dengan	Hambatan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi) , sistem informasi	Melakukan perapian data Memperbaiki manajemen informasi data

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
	gangguan jiwa berat	(pencatatan dan pelaporan SPM) dan regulasi kesehatan, hambatan pada pemberdayaan masyarakat, sediaan alat kesehatan, Hambatan pada Sumber Daya kesehatan	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata laksana penderita ODGJ Melitus melalui desa
11	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tubercolusis	Penemuan penderita rendah, kepatuhan pengobatan rendah, stigma masih tinggi	Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tuberkolosis yang tidak terobati, dan memberikan informasi kemudahan pengobatan di fasyankes
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Stigma negative masih tinggi	Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat perihal minimnya resiko penularan saat bersosialisi dengan penderita dan memberikan informasi kepada penderita tentang fasilitas yang dapat diperoleh di fasyankes

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 2 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

Indikator Pencapaian pelayanan dasar yang diselenggarakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari :
   - Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik :

Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic

4.3.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pacitan sebagaimana table berikut :

Tabel 4.14

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2022

2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2022

4.3.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagiamana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.15

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai %		Target RPJMD %	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2022	100	112.678	100	112.678	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai %		Target RPJMD %	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2022	100	147.277	100	142.136	96,51

4.3.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Yang berkaitan dengan indikator SPM bidang pekerjaan umum alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.16

Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar			Capaian Thn 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM					
					Tahun 2022				Sumber dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Thn)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program	Kegiatan	APBD	APBN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Jumlah warga Negara yang**	**100**	**2022**	**100**	**100**	**100**	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9,546,719,9	

No	Pelayanan Dasar			Capaian Thn 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM					
					Tahun 2022				Sumber dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Thn)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program	Kegiatan	APBD	APBN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari						PENYEDIAAN AIR MINUM		66	
2	**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah**	**100**	**2022**	**96,51**	**100**	**96,51**	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,858,009,500	

No	Pelayanan Dasar			Capaian Thn 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM					
					Tahun 2022				Sumber dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Thn)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program	Kegiatan	APBD	APBN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	domestik									

4.3.4 DUKUNGAN PERSONEL

Tabel 4.17

Dukungan Personel SPM Bidang Pekerjaan Umum

	L	P
SD/MI	1	0
SLTP/MTS	4	0
SMA/SMK	46	12
D1	0	1
D2	3	0
D3	5	
S1	42	17
S2	5	1
JUMLAH	**106**	**31**
TOTAL	**137**	

4.3.5 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM:

Tabel 4.18

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	**2**	**3**	**4**
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Kondisi topografi daerah, sebagian besar pegunungan 2. Ketersediaan air/sumber air baku terbatas 3. Kelembagaan pengelola air minum perdesaan sebagian besar belum optimal	- Mencari sumber-sumber air baru, embung dan aliran sungai yang mempunyai potensi untuk penyediaan air minum - Meningkatkan konservasi sumber daya air untuk kelestarian sumber air - Meningkatkan partisipasi

			masyarakat, BUMDES, CSR dalam pembangunan dan pengembangan sarana air bersih - Meningkatkan pembinaan HIPPAM oleh OPD terkait
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1. Kondisi ekonomi masyarakat masih banyak yang tidak mampu 2. Sarana dan prasarana air bersih terbatas 3. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan bangunan masih kurang	Meningkatkan sosialisasi dan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan dan pendanaan

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat ada2 Jenis Layanan Dasar yaitu :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pacitan sebagaimana table berikut :

Tabel 4.19

Target Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2022
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2022

4.4.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh sebagiamana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.20

Realisasi Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	TARGET SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator			Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
I	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100%	2022	100	**9 unit**	100%	**9 unit**	**100%**
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	100%	2022	100	**0 unit**	100%	**0 unit**	**100%**

4.4.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah. Yang berkaitan dengan indikator SPM bidang pekerjaan umum alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.21

Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar			Capaian Thn 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM					
					Tahun 2022				Sumber dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Thn)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100	2022	100%	100%	100%	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	100	2022	-	100%	-	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	259.556.000		

4.4.4 Dukungan Personel

- Sarjana Teknik Sipil/ Arsitek/ teknik lingkungan/ industry/ planologi atau sarjana lain untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan dalam penyelenggaraan pekerjaan Bidang Perumahan rakyat.
- Sarjana sosial / ilmu hokum/ ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Perumahan.
- Diploma 3 yang sesuai atau yang sederajat.
- SMU yang sesuai atau yang sederajat.

- **Tabel 4.22**
- Dukungan Personel SPM Bidang Perumahan Rakyat

N	Status	Laki-	Perempu	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1		**1**
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1		**1**
3	Pembina (IV/a)	2		**2**
4	Penata Tk. I (III/d)	5		**5**
5	Penata (III/c)	2	1	**3**
6	Penata Muda Tk. I (III/b)		2	**2**
7	Penata Muda (III/a)	2	1	**3**
8	Pengatur Tk. I (II/d)	4	2	**6**
9	Pengatur (II/c)	1		**1**
TOTAL		**18**	**6**	**24**

4.4.5 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM:

Tabel 4.23

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	***2***	***3***	***4***
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	1. Lokasi yang sangat jauh dari akses perekonomian dan penghasilan masyarakat yang rendah. 2. Akses Lokasi yang sulit 3. Tidak ada kegiatan relokasi karena	Harus dibantu dengan swadaya masyarakat setempat dan pendanaan

		program pemerintah sehingga tidak tercapai.	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	1. Lokasi yang sangat jauh dari akses perekonomian dan penghasilan masyarakat yang rendah 2. Akses Lokasi yang sulit	Harus dibantu dengan swadaya masyarakat setempat dan pendanaan

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Pelayanan informasi rawan bencana;
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah Tahun 2022

Target dan Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24

Target Pencapaian Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022	
		Indikator			Dalam Angka	Dalam (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan ketentraman	Jumlah Warga	100%	Setiap Tahun	5	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022	
		Indikator			Dalam Angka	Dalam (%)
	dan ketertiban Umum	Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada				
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	SetiapTahun	599.182	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	SetiapTahun	599.182	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	100%	Setiap Tahun	363	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022	
		Indikator			Dalam Angka	Dalam (%)
		penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	400	100%

4.5.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh sebagiamana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.25

Realisasi Pencapaian Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022		Capaian SPM 2022	
					Dalam Angka	Dalam (%)	Dalam Angka	Dalam (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanankete ntraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Setiap Tahun	5	100%	5	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi	100%	Setiap Tahun	599.182	100%	599.182	100%

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022		Capaian SPM 2022	
					Dalam Angka	Dalam (%)	Dalam Angka	Dalam (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rawan bencana						
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	599.182	100%	599.182	6,09%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun	363	100%	948	261,15%

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022		Capaian SPM 2022	
					Dalam Angka	Dalam (%)	Dalam Angka	Dalam (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	SetiapTahun	400	100%	400	100%

4.5.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD tahun 2022 dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM Tahun 2022				Sumber Dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			
							1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan			

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM				Sumber Dana	
					Tahun 2022					
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							Bupati/Wali Kota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		**267,150,000**	

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM				Sumber Dana	
					Tahun 2022					
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap			

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM Tahun 2022				Sumber Dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100 %				

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM Tahun 2022				Sumber Dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	bencana									
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	Setiap Tahun	100%	100%	0,87%				

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM				Sumber Dana	
					Tahun 2022					
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	bencana									

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM Tahun 2022				Sumber Dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%	100%	115%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)			

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM				Sumber Dana	
					Tahun 2022					
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			

No	Pelayanan Dasar			Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian, Target dan Rencana Pembiayaan SPM Tahun 2022				Sumber Dana	
	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu (Tahun)		Target RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%) Semester II	Program/ Kegiatan	Rencana Pembiayaan	APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			

4.5.4 Dukungan Personel

SATPOL PP dan BPBD Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas sampai akhir tahun 2022 didukung oleh 169 orang,terdiri dari :

Tabel 4.26

Dukungan Personel SPM Bidang Ketentramanm Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pendidikan	Trantibumlinmas		Jumlah
	Satpol PP	BPBD	
SLTP/MTS	5	0	5
SLTA/MA	93	21	114
D2	0	2	2
D3	1	3	4
S1	7	28	35
S2	7	2	9
JUMLAH	**113**	**56**	**169**

4.5.6 Permasalahan Dan Solusi

- **Permasalahan**
  1) Kesadaran ketaatan masyarakat terhadap PERDA dan Perkada masih rendah
  2) Penyelenggaraan penanganan bencana kurang intensif
  3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
  4) Sumber daya manusia terbatas

- **Solusi**
  1) Peningkatan sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada Masyarakat
  2) Menyiapkan regulasi penanggulangan bencana dan SOP
  3) Intensifitas koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana
  4) Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam menyikapi kondisi topograpi
  5) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait, Pengusaha serta Komunitas Masyarakat

4.6 Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Nilai capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Pacitan dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.27

Target Pencapaian Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022
4	Rehabilitasi Sosial Dasar	Persentase (%)	100%	2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
	Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100%	2022

4.6.2 Realisasi SPM Kabupaten Pacitan Tahun 2022

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh sebagiamana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.28

Realisasi Pencapaian Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022	100%	310	100%	310	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantardi Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022	100%	350	100%	350	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022	100%	125	100%	125	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Target SPM 2022			Capaian SPM 2022	
		Indikator	Nilai		Target RPJM (%)	Dalam Angka	Dalam %	Dalam Angka	Dalam %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022	100%	10	100%	10	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100%	2022	100%	340	100%	340	100%

4.6.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.29

Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TAHUN 2022			KEGIATAN	SUMBER DANA	
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	Batas waktu (Thn)		TARGET RPJMD (%)	REALISIASI CAPAIAN (%) SEMESTER II	PROGRAM		APBD	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022	100%	100%	100%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	322.280.000	

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TAHUN 2022			KEGIATAN	SUMBER DANA	
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	Batas waktu (Thn)		TARGET RPJMD (%)	REALISIASI CAPAIAN (%) SEMESTER II	PROGRAM		APBD	APBN
								Luar Panti Sosial		
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2021	100%	75%	100%				

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TAHUN 2022			KEGIATAN	SUMBER DANA	
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	Batas waktu (Thn)		TARGET RPJMD (%)	REALISIASI CAPAIAN (%) SEMESTER II	PROGRAM		APBD	APBN
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022	100	100	100				
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	2022	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial			

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TAHUN 2022			KEGIATAN	SUMBER DANA	
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	Batas waktu (Thn)		TARGET RPJMD (%)	REALISIASI CAPAIAN (%) SEMESTER II	PROGRAM		APBD	APBN
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	100%	2022	100	100	100	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	75.000.000	

4.6.4 Dukungan Personel

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

Tabel 4.30

Dukungan Personel SPM Bidang Sosial

PENDIDIKAN	BIDANG SOSIAL	
	L	P
SD/MI	1	-
SLTP/MTS	-	-
SLTA/MA	4	2
D1	-	-
D2	-	-
D3	-	-
S1	7	7
S2	3	2
JUMLAH	15	11
TOTAL	**26**	

4.6.5 Permasalahan Dan Solusi

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		1. Kurangnya anggaran untuk penanganan PSKS 2. Masih kurangnya SDM pada Dinas Sosial 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai 4. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan	1. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediannya sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PSKS. 2. Meningkatkan koordinasi dan instansi terkait serta lintas sektor dalam penanganan PSKS.

BAB V

PENUTUP

5.1 Penghargaan/Prestasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya serta media telah mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Pacitan dianugerahi berbagai penghargaan. Berbagai prestasi dan penghargaan berhasil ditorehkan dalam berbagai bidang pembangunan dan memperoleh pengakuan baik pada level nasional. Adapun penghargaan dan prestasi yang telah dicapai pada periode Tahun 2022 sebagaimana berikut :

Tabel 5.1.

Capaian Penghargaan Kabupaten Pacitan Tahun 2022

No	Jenis Penghargaan	Status	DOkumentasi	Tahun

01	Penghargaan Terbaik 1 Kab/Kota wilayah Jawa Pendukung Program KUR	NASIONAL (KEMENKO PEREKONOMIAN) (16/01/2022)		2022
02	WTP Ke-11	NASIONAL (BPK RI) 20/05/22		2022
03	Penghargaan Terbaik III Penilaian kompetensi Pemerintah Kabupaten Wilayah Barat Tipe Besar Kategori Implementasi Manajemen ASN	Nasional (BKN Award 2022) 10/08/2022		2022
04	Lencana Bakti Desa Pertama	Nasional (Kemendes PDTT} 27/10/2022		2022
05	Lencana Bhakti Ekonomi Desa	Nasional (Kemendes PDTT} 27/10/2022		2022

06	Penghargaan Gema Indonesia Persada.ID Juara 2 Reportase Terbaik Bagi Insan Radio TV publik se-tanah air. Diberikan Kepada Penyiar LPP Radio Suara Pacitan.	Nasional (Indonesia Persada.ID) 18/10/2022		2022
07	Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2021 dengan opini WTP	Nasional (Kementerian Keuangan) 14/11/2022		2022
08	Perhargaan Sebagai Badan Publik Terinformatif Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi (KI Jatim) 30/11/2022		2022
09	Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Kinerja Terbaik Penyaluran Dana Desa Tahun 2022	(Provinsi) Kanwil Dirjend Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur 15/12/2022		2022

5.2 Penutup

Upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan selama tahun 2022 senantiasa dilakukan dengan kerja keras dan itikad baik oleh Bupati Pacitan beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan indikator kinerja guna pelayanan masyarakat. Dinamika administrasi pemerintahan dan psiko sosial publik paska pandemi Covid - 19 menyebabkan beberapa masalah, sehingga target capaian

kinerja pemerintahan di beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun Kesatu (I) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 kurang tercapai dengan maksimal. Keadaan ini juga berdampak terhadap kurangnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat secara umum.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pacitan tahun 2022 merupakan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang disusun berkat kerjasama dan partisipasi semua pemangku kepentingan pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, para pelaku perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang dibiayai oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Oleh karena itu kita harus meningkatkan komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan penyiapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, karena permasalahan pembangunan yang kita hadapi ke depan semakin penuh tantangan sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan rakyat.

Terima kasih yang sebesar – besarnya kami ucapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Pacitan secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tahun 2022.

Apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun

Anggaran 2022 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun – tahun mendatang.

Demikian laporan ini dibuat sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Pacitan. Aamiin.

.

Pacitan, Maret 2023

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI